

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM
DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Dessy Sunarwarsiki

NIM: 062114094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM
DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Dessy Sunarwarsiki

NIM: 062114094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SESUDAH
GEMPA 27 MEI 2006
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul)**



Oleh:

Dessy Sunarwarsiki

NIM: 062114094

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Firma", written in a cursive style.

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA

Tanggal: 9 Mei 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006 Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Dessy Sunarwarsiki

NIM: 062114094

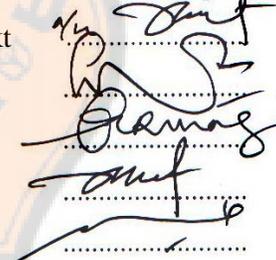
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Mei 2011
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt, QIA
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt, QIA
Anggota	Josephine Wuri, S.E., M.Si.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 31 Mei 2011

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dean



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

-Aristoteles-

*Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.*

- Confusius-

*Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat
masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan
penuh kesadaran.*

- James Thurber-

Karya ini kupersembahkan untuk:

- Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepadaku
- Keluargaku yang telah memberikan semangat, dorongan dan kasih sayang kepadaku.
- Guru dan dosenku yang selalu membimbing dan mendidikku selama ini.
- Teman-temanku yang selalu mendukungku.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006 dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 24 Mei 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Mei 2011
Yang membuat pernyataan,

Dessy Sunarwarsiki

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Dessy Sunarwarsiki

NIM : 062114094

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Mei 2011

Yang menyatakan



Dessy Sunarwarsiki

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul: **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006”** dengan mengambil studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan, arahan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Rama Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian penulis.
3. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
4. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Ir. Drs. Hansiadi Yuli H., M.Si., Akt., QIA, selaku Dosen Pembimbing Akademik angkatan 2006 kelas B atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan.
6. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, nasihat dan masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
7. Eduardus Maryarsanto P, S.E., Akt., QIA dan Ibu Josephine Wuri, S.E., M.Si., selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masih di bangku kuliah.
9. Mas Hastoro, Mas Yuli, Mas Frans yang telah membantu dan melayani semua kebutuhan akademis selama belajar di Akuntansi USD, Ibu Tutik di BEI Fakultas Ekonomi, Bapak Widodo atas semangat dan dorongan yang diberikan
10. Bapak Ir. Pulung Haryadi Msc. selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
11. Bapak Wahyudi dan Ibu Nur selaku staf DPKAD Kabupaten Bantul bagian Pajak Daerah yang telah memberikan data dan informasi yang relevan serta membantu meluangkan waktu untuk diwawancarai.
12. Keluargaku yang telah memberikan semangat, dorongan, doa dan kesempatan kepada penulis untuk meneruskan pendidikan selama ini.
13. Temanku Dita dan Jojo yang telah mengantarku mencari data.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14. Fanny, Chan-Chan dan Vivi atas bantuan pinjaman buku dan masukkan yang telah diberikan.
15. Teman-teman MPT: Dita, Eka, Rere, Della, Famela, Bowo, Vero, Yesi, Rika, Bayu, Mas Thomas atas kerjasama, semangat dan dorongan yang diberikan kepada penulis.
16. Teman-teman KKP Pinggir Gunung: Adhi “lele”, Puji, Kalis dan teman-teman KKP Imogiri atas kerjasama dan keceriaan yang telah diberikan.
17. Teman-teman dan sahabat-sahabatku: Ani, Dita, Patmi, Mery, Regina, Fany, Dina, Wulan, Ria, Arum, Chan-Chan, Kunthi, Lusi, Fenti, Eska, Bayu, Mbex, Rini, Greg, Seno, Doni, Bella, Inkan, Djinonk, Risa, Tata dan semua teman-teman akuntansi 2006 atas keceriaan, kebersamaan, dukungan dan kerjasama yang telah diberikan.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun, dalam menyusun skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang diberikan sangat penulis harapkan sehingga, dapat bermanfaat bagi kesempurnaan skripsi ini dan bagi penulis.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih.

Yogyakarta, 24 Mei 2011

Penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penelitian	5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Pajak	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Fungsi Pajak	6
3. Sistem Pemungutan Pajak	7
4. Pengelompokan Pajak	8
5. Syarat Pemungutan Pajak	9
6. Asas Pemungutan Pajak	10
7. Hambatan Pemungutan Pajak	11
8. Tarif Pajak	13
B. Pendapatan Asli Daerah	13
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	13
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	14
C. Pajak Daerah	18
1. Dasar Hukum	18
2. Pengertian Pajak	18
3. Jenis Pajak	18
D. Hipotesis	19

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian	23
C. Subjek Penelitian	24
D. Objek Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Jenis Data	25
G. Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL	43
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Bantul	43
B. Letak Geografis	44
C. Batas Wilayah	44
D. Luas Wilayah	44
E. Pembagian Administratif	44
F. Keadaan Alam	46
G. Kepadatan Penduduk	47
H. Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	47
1. Pajak Hotel	47
2. Pajak Restoran	48
3. Pajak Hiburan	49
4. Pajak Reklame	51
5. Pajak Penerangan Jalan	52

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	54
7. Pajak Parkir	56
I. Gempa 27 Mei 2006	57
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	63
A. Deskripsi Data	63
B. Analisis Data dan Pembahasan	64
1. Analisis Besarnya Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.....	64
2. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006	86
a. Uji Normalitas Data	86
b. Analisis Uji Beda Dua Rata-Rata Sampel	87
c. Analisis <i>Independent Sample t Test</i>	93
3. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009	97
4. Analisis Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006	101
a. Uji Normalitas Data	101
b. Analisis Uji Beda Dua Rata-Rata Sampel	102
c. Analisis <i>Independent Sample t Test</i>	108

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Ketebatasan Penelitian	113
C. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	118



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Tabel Pembagian Administratif	46
Tabel 2 : Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009	64
Tabel 3 : Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009	64
Tabel 4 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2003	66
Tabel 5 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2004	69
Tabel 6 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005	73
Tabel 7 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006	76
Tabel 8 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2007	78
Tabel 9 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2008	81
Tabel 10 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2009	84
Tabel 11 : Tabel <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	87
Tabel 12 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2005 (Sebelum Gempa 27 Mei 2006) ...	88
Tabel 13 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 (Sesudah Gempa 27 Mei 2006) ...	88
Tabel 14 : Penghitungan rata-rata realisasi penerimaan Pajak Daerah sebelum gempa 27 Mei 2006)	90

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 15	: Penghitungan rata-rata realisasi penerimaan Pajak Daerah sesudah gempa 27 Mei 2006)	91
Tabel 16	: Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	99
Tabel 17	: Tabel <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	102
Tabel 18	: Realisasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2005 (Sebelum Gempa 27 Mei 2006)	103
Tabel 19	: Realisasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 (Sesudah Gempa 27 Mei 2006)	103
Tabel 20	: Penghitungan rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Gempa 27 Mei 2006 ...	105
Tabel 21	: Penghitungan rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesudah Gempa 27 Mei 2006	106

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

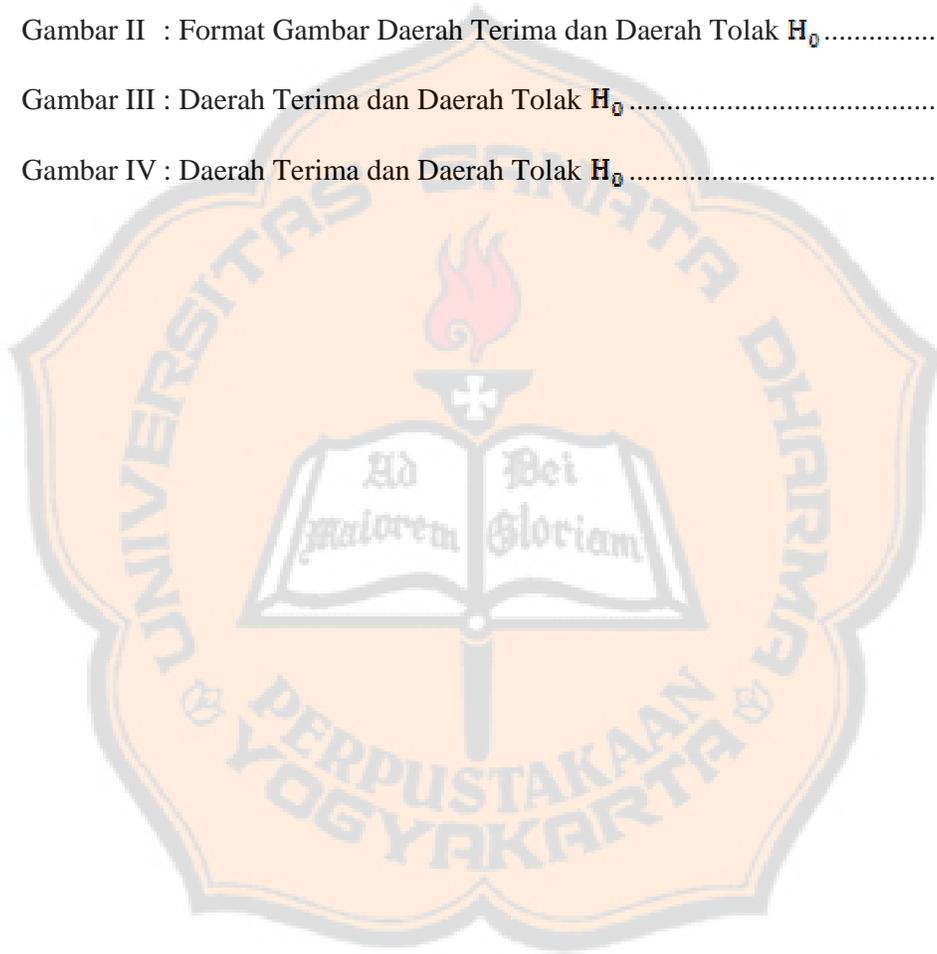
DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 1 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2003.....	66
Diagram 2 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2004.....	69
Diagram 3 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005.....	73
Diagram 4 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006.....	76
Diagram 5 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2007.....	78
Diagram 6 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2008.....	81
Diagram 7 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2009.....	84
Diagram 8 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	101

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I : Format Gambar Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0	30
Gambar II : Format Gambar Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0	38
Gambar III : Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0	92
Gambar IV : Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0	107



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006 (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul)

Oleh:

Dessy Sunarwarsiki

NIM: 062114094

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2011

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, (2) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006, (3) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, (4) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. Penelitian berjenis studi kasus. Data yang digunakan yaitu data tentang target dan realisasi Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2003 sampai 2009. Teknik analisis data yang digunakan adalah diagram roti, analisis kontribusi dan analisis *Independent Sample t Test*.

Kesimpulan yang dapat diperoleh: (1) Pajak Penerangan Jalan merupakan penerimaan terbesar dan Pajak Parkir merupakan penerimaan terkecil di Kabupaten Bantul, (2) Berdasarkan hasil analisis *Independent Sample t Test* menunjukkan bahwa ada perbedaan penerimaan Pajak Daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006, (3) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 berkisar antara 15,91% hingga 23,02%, dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu 23,02% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2009 yaitu 15,91% sedangkan, kontribusi tahun 2003 sebesar 20,07%, tahun 2005 sebesar 20,72%, tahun 2007 sebesar 17,81% dan tahun 2008 sebesar 17,29%, (4) Berdasarkan hasil analisis *Independent Sample t Test* menunjukkan bahwa ada perbedaan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 .

ABSTRACT

**AN ANALYSIS OF REGIONAL TAX REVENUE CONTRIBUTION TO
REGIONAL ORIGINAL REVENUE (PAD)
BEFORE AND AFTER THE EARTHQUAKE ON MAY 27, 2006**

(A Case Study at Regency Government of Bantul)

**Dessy Sunarwarsiki
062114094**

**Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011**

The aims of the research were: (1) to find out how much the regional tax revenue in Bantul Regency from 2003 until 2009, (2) to analyze whether there was difference in regional tax revenue before and after the earthquake on May 27, 2006, (3) to know how much the contribution of regional tax to the regional original revenue (PAD) from 2003 until 2009 and (4) to find out whether there was difference in the contribution of regional tax to regional original revenue (PAD) before and after the earthquake on May 27, 2006. The data analysis techniques used were pie diagram, contribution analysis and Independent Sample t-Test analysis.

The conclusions that could be obtained: (1) The Street Light Tax was the highest revenue and Parking Tax was the smallest revenue in Bantul Regency, (2) Based on the result of Independent Sample t-Test data analysis, the result showed that there was difference in regional tax revenue before and after the earthquake on May 27, 2006, 3) The contribution of regional tax toward regional original revenue (PAD) from 2003 until 2009 ranged between 15,91% and 23,02% where the highest contribution was in 2004 as much as 23,02% and the smallest contribution occurred in 2009 as much as 15,91% whereas the contribution in 2003 was 20,07%, in 2005 was 20,72%, in 2007 was 17,81% and in 2008 was 17,29%, (4) Based on the result of the Independent Sample t-Test data analysis, the result showed that there was difference in regional tax revenue contribution before and after the earthquake on May 27, 2006.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu segi atau kriteria penting untuk menilai secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dimana salah satu komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003: 49-50). Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan kontribusi pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana yang merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul antara lain pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bantul mampu memberikan kontribusi tertinggi pada Pendapatan Asli Daerah meskipun diprediksi kontribusi ini belum meningkat secara signifikan.

Namun, pada tanggal 27 Mei 2006 silam, bencana alam berupa gempa bumi sebesar 5,9 SR yang melanda Yogyakarta membuat sendi-sendi perekonomian daerah menjadi luluh lantak terutama di Kabupaten Bantul yang merupakan kabupaten dengan kondisi terparah di Yogyakarta karena pusat gempa yang berada di Kabupaten Bantul. Akibat bencana ini segala aktivitas perekonomian di Yogyakarta, terutama di Kabupaten Bantul menjadi terhenti untuk beberapa saat serta hal ini juga berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul terutama penerimaan pajak daerah. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengulas lebih lanjut mengenai kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009?
2. Apakah ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006?
3. Berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009?
4. Apakah ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006?

C. Batasan Masalah

Dalam membahas permasalahan ini, penulis tidak memasukkan tahun anggaran 2006 ke dalam pengujian hipotesis, karena tahun 2006 dianggap sebagai *cut off* terjadinya gempa.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui berapa besar penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.
2. Mengetahui apakah ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

3. Mengetahui berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.
4. Mengetahui apakah ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya mengenai penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi, wawasan, dan pengetahuan baik bagi pihak Universitas Sanata Dharma maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap topik yang akan diteliti.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh penulis selama kuliah dan menambah wawasan dari praktik penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori

Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan yang ada untuk memecahkan masalah yang diajukan serta hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data, jenis data dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bantul

Bab ini meliputi sejarah Kabupaten Bantul, letak geografis, batas wilayah, luas wilayah, pembagian administratif, keadaan alam, kepadatan penduduk, pajak daerah di Kabupaten Bantul, gempa 27 Mei 2006.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

Bab VI Penutup

Pada bab ini akan disimpulkan hasil dari analisis data penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya serta saran untuk objek yang diteliti.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli dan berkenaan dengan hal ini yaitu (Zain, 2007: 10-11) :

Adriani mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Rochmat Soemitro juga mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2008: 1) yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga (Mardiasmo, 2008: 7) yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

4. Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain (Mardiasmo, 2008: 5).

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (Mardiasmo, 2008: 5).

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib pajak (Mardiasmo, 2008: 5).

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak (Mardiasmo, 2008: 5).

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya (Mardiasmo, 2008: 6).

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Mardiasmo, 2008:6).

5. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2008: 2-3) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib

Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

6. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak antara lain (Mardiasmo, 2008: 7):

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2008: 8-9):

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

1) *Tax avoidance*

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

Contoh:

Di Indonesia, untuk pegawai diberi tunjangan beras (natura). Menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Penghindarannya dengan cara: perusahaan bekerjasama dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi uang kepada yayasan, dan yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras. Jadi, pegawai tetap dapat beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya sehingga, pajaknya berkurang.

2) *Tax evasion*

Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Contoh:

- a) Wajib pajak tidak memenuhi pengisian SPT tepat pada waktunya.
- b) Wajib pajak tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya.
- c) Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan.
- d) Wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya.

8. Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak (Mardiasmo, 2008: 9), yaitu:

a. Tarif sebanding/ proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mahsun, dkk, 2007: 39) :

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah, yang bertujuan memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam menggali pendanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Nurlan, 2008: 135-136) sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

e. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi dikelompokkan sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum (Mardiasmo, 2008: 15) adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
 - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar.
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa usaha tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha (Mardiasmo, 2008: 16) adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c) Retribusi Tempat Pelelangan.
- d) Retribusi Terminal.

- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - g) Retribusi Penyedotan Kaskus.
 - h) Retribusi Pemotongan Hewan.
 - i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
 - j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
 - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - m) Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu (Mardiasmo, 2008: 16)

adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- c) Retribusi Izin Gangguan.
- d) Retribusi Izin Trayek.

f. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- g. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, restribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 3) Jasa giro.
- 4) Bunga deposito.
- 5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
- 6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak dan denda retribusi.
- 9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 10) Pendapatan dari pengembalian.
- 11) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 12) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 13) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

C. Pajak Daerah

1. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997.

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

4. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pajak Propinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut (Kountur: 2003: 93).

Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Hubungan Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006

Menurut Siwage dan dan Pakasa Bary (2008: 117) bahwa bencana alam dapat menyebabkan menurunnya pendapatan pajak yang disebabkan oleh basis pajak yang juga menurun. Penurunan penerimaan pajak ini akan membebani anggaran pemerintah.

Horwich (2000) dalam Siwage dan Pakasa Bary (2008: 117) menyatakan bahwa pada tahun 1995 setelah terjadinya gempa bumi di Kobe, pertumbuhan ekonomi di Jepang mencapai 1,4%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi periode awal 1990-an (sebelum terjadinya bencana) yang hanya dibawah 1%.

Menurut Benson dan Clay (2000, 2004) dalam Siwage dan Pakasa Bary (2008: 119) menyatakan dampak dari bencana alam dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) dampak langsung dari bencana meliputi kerugian finansial dari kerusakan asset-aset ekonomi (misalnya: rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian dan sebagainya); (2) dampak tidak langsung meliputi: terhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan; (3) dampak lanjutan meliputi: terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana-rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya utang publik dan meningkatnya angka kemiskinan. Salah satu contoh dari kerugian ekonomi akibat gempa bumi di DIY dan Jawa Tengah oleh Bappenas (2006). Dimana menurut hasil perhitungan Bappenas diperkirakan besarnya

kerusakan dan kerugian akibat terjadinya gempa bumi tersebut mencapai 29,1 triliun. Angka ini meliputi total kerusakan dari dampak langsung yang dialami oleh asset pemerintah, dunia usaha dan masyarakat senilai 22,8 triliun dan total kerugian ekonomi akibat dampak tidak langsung akibat hilangnya asset-aset ekonomis tersebut mencapai 6,4 triliun.

H_a = Ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

2. Hubungan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006.

Riduansyah (2008: 49) menyatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Dimana untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Melda (2009) dalam penelitiannya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui kontribusi pajak hotel sebelum dan sesudah

gempa terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitiannya ditarik kesimpulan bahwa tingkat efisiensi di kabupaten DIY sesudah gempa pada tahun 2007 adalah positif (tinggi) karena rata-rata penerimaan tiap kabupaten di propinsi DIY di atas 100% ini membuktikan gempa tidak berpengaruh pada pajak hotel di propinsi DIY. Hal ini dikarenakan peneliti memilih lokasi yang tidak terpengaruh langsung terhadap gempa 27 Mei 2006 sehingga, hasil yang diperoleh kurang signifikan.

Yacinta (2009) dalam penelitiannya di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. Dalam memecahkan permasalahan ini Yacinta menggunakan pengujian hipotesis uji T-Sampel Berpasangan. Dimana pengujian ini ditemukan bahwa tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. Hal ini dikarenakan peneliti memilih lokasi yang tidak terpengaruh langsung terhadap gempa 27 Mei 2006 sehingga, hasil yang diperoleh kurang signifikan.

H_a = Ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Studi kasus dan lapangan (*case and field study*) merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Subjek yang diteliti berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu (Indriantoro, 2002: 26). Hasil yang diperoleh dari analisis data ini hanya berlaku untuk objek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian : Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.
2. Tempat Penelitian : DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bantul, Jln. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul 55711.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan (Arikunto, 2003: 116). Subjek penelitiannya adalah:

1. DPKAD (Dinas Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bantul bagian pajak daerah untuk memperoleh informasi dan data mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.
2. BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bantul untuk memperoleh informasi mengenai gambaran umum Kabupaten Bantul.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu entitas yang akan diteliti (Jogiyanto, 2007: 61). Yang menjadi objek penelitian adalah:

1. Gambaran umum Kabupaten Bantul.
2. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.
3. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau catatan tertulis yang relevan dan akurat.

F. Jenis Data

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap sesuatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian (Indriantoro, 2002: 146-147). Data primer diperoleh dari tanya jawab dengan pihak Dinas Pajak dan Keuangan Daerah bagian pajak daerah saat data sekunder yang diperlukan kurang mencukupi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 2002: 147). Data sekunder berupa gambaran umum Kabupaten Bantul dan Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis berapa besar penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009

Dalam menjawab permasalahan ini yaitu dengan membuat diagram roti untuk mengetahui berapa besar prosentase setiap pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Bantul sehingga, dari diagram tersebut kita dapat mengetahui pajak daerah apa yang memberikan penerimaan terbesar hingga terkecil bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

2. Analisis perbedaan penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006

Dalam menjawab permasalahan ini, akan dilakukan dengan cara:

- a. Langkah pertama

Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka, terlebih dahulu data penelitian yang diambil harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik dari data tersebut. Salah satu jenis pengujian yang harus dilakukan yaitu dengan uji normalitas data. Tujuan digunakannya uji

normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kegiatan penelitian mempunyai distribusi (sebaran) yang normal atau tidak dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan mengenai rumus apa yang tepat untuk digunakan dalam menguji hipotesis.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal sehingga, pengujian hipotesis yang digunakan adalah jenis uji yang termasuk ke dalam statistik parametrik. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal sehingga, pengujian hipotesis menggunakan statistik non-parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi normalitas data.

b. Langkah kedua

Setelah melakukan uji normalitas data, maka dapat diketahui rumus yang tepat untuk digunakan dalam menguji hipotesis. Dimana untuk menjawab permasalahan kedua menggunakan perhitungan secara manual dan menggunakan program SPSS.

- 1) Dalam menghitung secara manual digunakan analisis uji beda dua rata-rata sampel. Uji t dua sampel ini tergolong uji perbandingan (uji komparatif). Dimana tujuan dari uji ini adalah untuk membandingkan (membedakan) apakah kedua data (variabel) tersebut sama atau berbeda. Adapun langkah-langkah untuk menguji

hipotesa permasalahan kedua sebagai berikut (Riduwan, 2008: 215-216):

a) Membuat rumusan hipotesis

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ = Tidak ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ = Ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

Keterangan:

μ_1 = rata-rata penerimaan pajak daerah sebelum gempa 27 Mei 2006.

μ_2 = rata-rata penerimaan pajak daerah sesudah gempa 27 Mei 2006.

b) Menentukan tingkat nyata (α)

Taraf nyata yang digunakan sebesar 5% (0,05) yaitu taraf nyata yang digunakan pada ilmu ekonomi.

c) Menentukan t_{tabel}

$$t_{tabel} = (df; \alpha/2)$$

$$df = n_1 + n_2 - 2$$

d) Mencari t_{hitung}

Rumus t_{hitung} sebagai berikut (Lukman, 2009: 120):

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 + n_2 - 2)} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Keterangan (Riduwan, 2008: 214):

\bar{X}_1 = rata – rata sampel ke – 1

\bar{X}_2 = rata – rata sampel ke – 2

n_1 dan n_2 = jumlah sampel

s_1^2 = varians sampel ke – 1

s_2^2 = varians sampel ke – 2

Rumus untuk menghitung standar deviasi sebagai berikut:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{X})^2}{n-1}}$$

Keterangan (Lukman, 2009: 21):

s = standar deviasi

x – nilai observasi

\bar{X} = rata – rata sampel

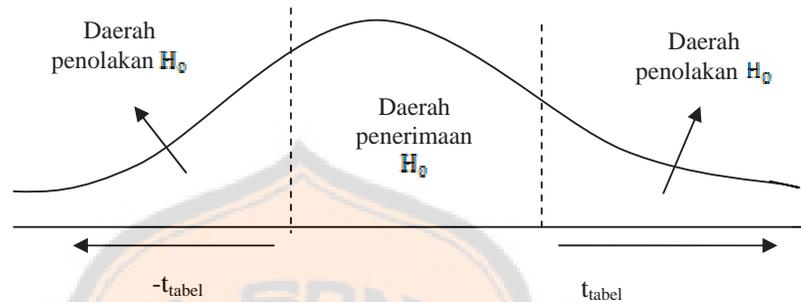
n = jumlah sampel

e) Menentukan kriteria pengujian

H_0 diterima, jika $-t_{hitung} \leq t_{tabel} \leq +t_{hitung}$; artinya tidak ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

H_0 ditolak, jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$; artinya ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

f) Membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel}



Gambar I: Format Gambar Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0

g) Mengambil kesimpulan

Jika nilai t_{hitung} di daerah terima H_0 maka, H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya, apabila nilai t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 , maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

2) Menghitung dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Untuk penelitian kali ini menggunakan program SPSS 18 for Windows yaitu dengan menggunakan *Independent-Sample t Test*. Independen atau bebas disini berarti tidak ada hubungan antara dua sampel yang akan diuji (Singgih, 2010: 263). Uji ini akan membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, dengan tujuan apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama

ataukah tidak. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut (Singgih, 2010: 89-90):

a) Masukkan data ke data editor dengan mendefinisikan variabel pada Variabel View.

b) Klik Analyze → Compare Means → Independent-Sample t Test.

c) Pengisian:

(1) Test Variable (s); masukkan variabel penerimaan pajak.

(2) Grouping Variable atau variabel group. Karena variabel pengelompokan ada ada variabel waktu, maka masukkan variabel waktu

Pengisian group:

(a) Klik mouse pada Define Group.

(b) Untuk Group 1, isi dengan 1, yang berarti Grup 1 berisi tanda 1 atau 'sebelum gempa'.

(c) Untuk Group 2, isi dengan 2, yang berarti Grup 2 berisi tanda 2 atau 'sesudah gempa'.

d) Setelah pengisian selesai, tekan Continue untuk kembali ke menu sebelumnya.

e) Selanjutnya, klik OK untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis dan memulai proses data.

Setelah diperoleh hasil dari *Independent-Sample t Test*, maka untuk melakukan pengujian hipotesis bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut (Ghozali, 2008: 57-58):

Dalam menganalisis output *Independent-Sample Test*, ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan yaitu:

a) Pertama adalah pengujian untuk mengetahui apakah varians populasi identik ataukah tidak yaitu dengan melihat nilai *Levene Test*.

Nilai *Levene Test* digunakan untuk menguji terlebih dahulu apakah varians populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variances assumed*) ataukah berbeda (*equal variances not assumed*). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

(1) Hipotesis

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ = Tidak ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ = Ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(2) Pengambilan Keputusan

Dasar pengambilan keputusan

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima artinya kedua varians sama.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak artinya kedua varians berbeda.

(3) Keputusan

Jika pada output *Independent Sample Test*, bahwa:

(a) F hitung levene test $> 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya kedua varians adalah sama. Dengan demikian, analisis uji beda *t-test* harus menggunakan asumsi *Equal variances assumed*.

(b) F hitung levene test $< 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya kedua varians adalah berbeda. Dengan demikian, analisis uji beda *t-test* harus menggunakan asumsi *Equal variances not assumed*.

b) Kedua adalah analisis output dengan memakai *t-test*.

Nilai *t-test* untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara signifikan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

(1) Hipotesis

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ = Tidak ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ = Ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(2) Pengambilan Keputusan

(a) Berdasar perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}

- Jika $-t_{hitung} \leq t_{tabel} \leq +t_{hitung}$ maka, H_0 diterima artinya tidak ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

- Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka, H_0 ditolak artinya ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(b) Dasar pengambilan keputusan

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya tidak ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

3. Analisis kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Bantul dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009

Dalam menjawab permasalahan ini, maka digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Daerah}_n}{\text{Total PAD}_n} \times 100\%$$

Keterangan:

Kontribusi : Prosentase pajak daerah terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah_n : Besarnya pajak daerah dalam tahun n

Total PAD_n : Total Pendapatan Asli Daerah tahun n

4. Analisis perbedaan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

Dalam menjawab permasalahan ini, akan dilakukan dengan cara:

a. Langkah pertama

Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka, terlebih dahulu data penelitian yang diambil harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik dari data tersebut. Salah satu jenis pengujian yang harus dilakukan yaitu dengan uji normalitas data. Tujuan digunakannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kegiatan penelitian mempunyai distribusi (sebaran) yang normal atau tidak dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan mengenai rumus apa yang tepat untuk digunakan dalam menguji hipotesis.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal sehingga, pengujian hipotesis yang digunakan adalah jenis uji yang termasuk ke dalam statistik parametrik. Sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal sehingga, pengujian hipotesis menggunakan statistik non-parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi normalitas data.

b. Langkah kedua

Setelah melakukan uji normalitas data, maka dapat diketahui rumus yang tepat untuk digunakan dalam menguji hipotesis. Untuk menjawab permasalahan keempat menggunakan perhitungan secara manual dan dengan menggunakan program SPSS.

1) Dalam menghitung secara manual digunakan analisis uji beda dua rata-rata sampel. Uji t dua sampel ini tergolong uji perbandingan (uji

komparatif). Dimana tujuan dari uji ini adalah untuk membandingkan (membedakan) apakah kedua data (variabel) tersebut sama atau berbeda. Adapun langkah-langkah untuk menguji hipotesa permasalahan kedua sebagai berikut (Riduwan, 2008: 215-216):

a) Membuat rumusan hipotesis

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ = Tidak ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ = Ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

Keterangan:

μ_1 = rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum gempa 27 Mei 2006.

μ_2 = rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah gempa 27 Mei 2006.

b) Menentukan tingkat nyata (α)

Taraf nyata yang digunakan sebesar 5% (0,05) yaitu taraf nyata yang digunakan pada ilmu ekonomi.

c) Menentukan t_{tabel}

$$t_{tabel} = (d_f; \alpha/2)$$

$$d_f = n_1 + n_2 - 2$$

d) Mencari t_{hitung}

Rumus t_{hitung} sebagai berikut (Lukman, 2009: 120):

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{(n_1+n_2-2)} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Keterangan (Riduwan, 2008: 214):

\bar{X}_1 = rata – rata sampel ke – 1

\bar{X}_2 = rata – rata sampel ke – 2

n_1 dan n_2 = jumlah sampel

s_1^2 = varians sampel ke – 1

s_2^2 = varians sampel ke – 2

Rumus untuk menghitung standar deviasi sebagai berikut:

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x-\bar{X})^2}{n-1}}$$

Keterangan (Lukman, 2009: 21):

s = standar deviasi

X = nilai observasi

\bar{X} = rata – rata sampel

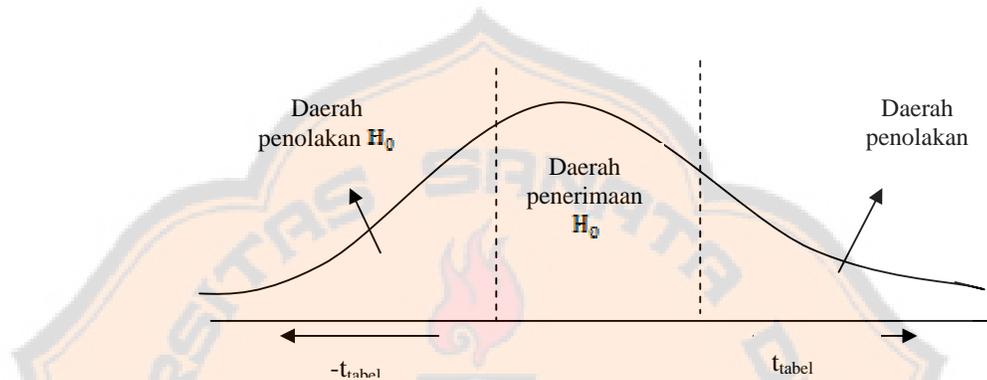
n = jumlah sampel

e) Menentukan kriteria pengujian

H_0 diterima, jika $-t_{hitung} \leq t_{tabel} \leq +t_{hitung}$; artinya tidak ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

H_0 ditolak, jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

f) Membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel}



Gambar II: Format Gambar Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0

g) Mengambil kesimpulan

Jika nilai t_{hitung} di daerah terima H_0 , maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya, apabila nilai t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 , maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

2) Menghitung dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Untuk penelitian kali ini menggunakan program SPSS 18 for Windows yaitu dengan menggunakan *Independent-Sample t Test*. Independen atau bebas disini berarti tidak ada hubungan antara dua sampel yang akan diuji (Singgih, 2010: 263). Uji ini akan membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, dengan tujuan apakah kedua grup

tersebut mempunyai rata-rata yang sama atukah tidak. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut (Singgih, 2010: 89-90):

a) Masukkan data ke data editor dengan mendefinisikan variabel pada Variabel View.

b) Klik Analyze → Compare Means → *Independent-Sample T test*.

c) Pengisian:

(1) Test Variable (s); masukkan variabel kontribusi.

(2) Grouping Variable atau variabel group. Karena variabel pengelompokan ada ada variabel waktu, maka masukkan variabel waktu

Pengisian group:

(a) Klik mouse pada Define Group.

(b) Untuk Group 1, isi dengan 1, yang berarti Grup 1 berisi tanda 1 atau 'sebelum gempa'.

(c) Untuk Group 2, isi dengan 2, yang berarti Grup 2 berisi tanda 2 atau 'sesudah gempa'.

d) Setelah pengisian selesai, tekan Continue untuk kembali ke menu sebelumnya.

e) Selanjutnya, klik OK untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis dan memulai proses data.

Setelah diperoleh hasil dari analisis *Independent-Samples t Test*, maka untuk melakukan pengujian hipotesis bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut (Ghozali, 2008: 57-58):

Dalam menganalisis output *Independent-Sample Test*, ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan yaitu:

a) Pertama adalah pengujian untuk mengetahui apakah varians populasi identik ataukah tidak yaitu dengan melihat nilai *Levene Test*.

Nilai *Levene Test* digunakan untuk menguji terlebih dahulu apakah varians populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variances assumed*) ataukah berbeda (*equal variances not assumed*). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

(1) Hipotesis

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ = Tidak ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ = Ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(2) Pengambilan Keputusan

Dasar pengambilan keputusan

(a) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima artinya kedua varians sama.

(b) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak artinya kedua varians berbeda.

(3) Keputusan

Jika pada output Independent Sample Test, bahwa:

(a) F hitung levene test $> 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa

H_0 diterima artinya kedua varians adalah sama. Dengan demikian, analisis uji beda *t-test* harus menggunakan asumsi *Equal variances assumed*.

(b) F hitung levene test $< 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa

H_0 ditolak artinya kedua varians adalah berbeda. Dengan demikian, analisis uji beda *t-test* harus menggunakan asumsi *Equal variances not assumed*.

b) Kedua adalah analisis output dengan memakai *t-test*.

Nilai *t-test* untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara signifikan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

(1) Hipotesis

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ = Tidak ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ = Ada perbedaan penerimaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(2) Pengambilan Keputusan

(a) Berdasar perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}

- Jika $-t_{hitung} \leq t_{tabel} \leq +t_{hitung}$ maka, H_0 diterima artinya tidak ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.
- Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka, H_0 ditolak artinya ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(b) Dasar pengambilan keputusan

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya tidak ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah singkat berdirinya Kabupaten Bantul

Titik awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vorstenlanden (peta kehidupan kerajaan kejawen) yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan dengan baik dalam hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif. Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal dengan Bantulkarang. Seorang Nayaka bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercayai

Sri Sultan Hamengku Buwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul. Nayaka disini merupakan sebutan empat orang kepala pemerintahan di dalam istana atau juga disebut Wedana Lebet, dimana Wedana Lebet ini bertugas di pemerintahan di dalam istana yang tempatnya dikelilingi benteng yang disebut narawita.

Tanggal 20 Juli inilah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada *Usamu Serei* Nomor 13 sedangkan *stadsgemente ordonantie* dihapus. Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintah ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No.1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No. 22 tahun 1948, dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia. Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.

B. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ}44'04''$ – $08^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}12'34''$ – $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur.

C. Batas Wilayah

Kabupaten Bantul secara geografis terletak di bagian selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
2. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
3. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

D. Luas Wilayah

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah $506,85 \text{ km}^2$ atau 50.685 ha.

E. Pembagian Administratif

Kabupaten Bantul secara administratif terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan.

Tabel 1. Pembagian Administratif

No	Kecamatan	Desa	Dukuh	Luas (Km ²)	%
1.	Srandakan	2	43	18.32	3.61
2.	Sanden	4	62	23.16	4.57
3.	Kretek	5	52	26.77	5.28
4.	Pundong	3	49	23.68	4.67
5.	Bambanglipuro	3	45	22.70	4.48
6.	Pandak	4	49	24.30	4.79
7.	Pajangan	3	55	33.25	6.56
8.	Bantul	5	50	21.95	4.33
9.	Jetis	4	64	24.47	4.83
10.	Imogiri	8	72	54.49	10.75
11.	Dlingo	6	58	55.87	11.02
12.	Banguntapan	8	57	28.48	5.62
13.	Pleret	5	47	22.97	4.53
14.	Piyungan	3	60	32.54	6.42
15.	Sewon	4	63	27.16	5.36
16.	Kasih	4	53	32.38	6.39
17.	Sedayu	4	54	34.36	6.78
	Jumlah	75	933	506.85	100.00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul

Dalam hal ini kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas yaitu 55.87 Km². Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan 8 desa dan 72 pedukuhan.

F. Keadaan Alam

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang subur, baik karena jenis lapisan tanahnya, pengairannya, kedataran wilayahnya maupun karena letaknya yang ada di penghujung selatan tempat sungai-sungai bermuara dan menumpuk lumpur vulkanik beserta endapan-endapan humus dari daerah utara. Keadaan alam yang sangat cocok untuk bidang pertanian maka, sebagian besar masyarakat Bantul bermatapencaharian sebagai petani.

G. Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul sampai dengan bulan Desember 2008 adalah sebanyak 909.812 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi ada di wilayah kecamatan Banguntapan sebesar 96,528 jiwa/Km², sedangkan kepadatan rendah ada di kecamatan Srandakan sebesar 34,001 jiwa/Km².

H. Pajak Daerah di Kabupaten Bantul

1. Pajak Hotel

a. Dasar hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2002.

b. Pengertian

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan di hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.

c. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah:

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Pelayanan tempat tinggal di asrama dan pondok pesantren.

- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Dimana tarif pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen).

2. Pajak Restoran

a. Dasar hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2002.

b. Pengertian

Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan di Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk rumah makan cafe, bar dan sejenisnya.

c. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran. Pelayanan yang dimaksud meliputi

penjualan makanan dan minuman, termasuk penyediaan penjualan makanan dan minuman yang diantar atau dibawa pulang.

Yang tidak termasuk objek Pajak Restoran meliputi pelayanan usaha jasa boga atau catering.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Dimana tarif pajak yang ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Pajak Hiburan

a. Dasar hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 1998

b. Pengertian

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga.

c. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- 2) Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- 3) Untuk pertunjukan/pergelaran musik ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- 4) Untuk diskotik, disko bar ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 5) Untuk karaoke ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 6) Untuk klab malam ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 7) Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

- 8) Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- 9) Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 10) Untuk mandi uap ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 11) Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- 12) Kegiatan lain yang dipersamakan dengan penyelenggaraan hiburan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

4. Pajak Reklame

a. Dasar hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2008.

b. Pengertian

Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

c. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Yang tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah:

- 1) Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, internet dan warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- 3) Penyelenggaraan reklame untuk kegiatan sosial dan keagamaan

Subjek Pajak Reklame adalah orang atau badan yang menggunakan reklame.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame berdasarkan biaya pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame. Tarif Pajak Reklame ditentukan sebesar 20% dan pada tahun 2009 tarif Pajak Reklame mengalami kenaikan menjadi sebesar 25%.

5. Pajak Penerangan Jalan

a. Dasar hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2003

b. Pengertian

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik.

c. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah pengguna tenaga listrik arus bolak-balik.

Yang tidak termasuk objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- 1) Pengguna tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- 2) Pengguna tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN dan bukan PLN.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik adalah dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kilowatt hour (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik dan dalam hal tenaga listrik bukan dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga

listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan selain industri tarif pajak ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

a. Dasar hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 1998 dimana petunjuk pelaksanaan didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 8A Tahun 2008.

b. Pengertian

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

c. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang dilaksanakan pemungutan pajaknya adalah:

- 1) Batu kapur
- 2) Batu apung
- 3) Bentonit
- 4) Granit
- 5) Kalsit
- 6) Pasir dan kerikil
- 7) Tanah liat
- 8) Tanah urug
- 9) Tras
- 10) Batu gunung
- 11) Batu kali dan
- 12) Pasir batu, sirtu

Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C.

Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi/pengambilan bahan galian golongan C.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.

Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

7. Pajak Parkir

a. Dasar hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2003

b. Pengertian

Pajak Parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang memungut bayaran.

c. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan tidak bermotor atau kendaraan bermotor dan atau garasi kendaraan tidak bermotor atau bermotor yang memungut bayaran.

Yang tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 3) Penyelenggaraan parkir yang bersifat sosial dan keagamaan.

4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di Parkir.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

I. Gempa 27 Mei 2006

Pada tanggal 27 Mei 2006, pukul 5.53 pagi, terjadi gempa bumi berkekuatan 5,9 pada skala Richter, yang berpusat di koordinat 8003' Lintang Selatan dan 110023' Bujur Timur, dengan kedalaman hanya 33 kilometer dari permukaan tanah. Letak pusat gempa tersebut berjarak hanya sekitar 35 km dari kota Yogyakarta. Gempa dirasakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Bencana ini telah mengakibatkan kerusakan yang cukup besar, terutama di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Klaten. Adapun perkiraan kerugian dan kerusakan akibat terjadinya gempa bumi antara lain:

1) Perumahan, Sarana dan Prasarana Publik

a) Sektor perumahan

Perumahan mengalami dampak yang paling parah. Total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp29,1 triliun. Rumah-rumah pribadi terkena dampak paling parah, bernilai lebih dari setengah dari total kerusakan dan kerugian Rp15,3 triliun.

b) Sektor Sarana dan Prasarana Publik

(1) Sektor Transportasi dan Perhubungan

Dalam sektor transportasi dan perhubungan, adapun perkiraan kerugian dan kerusakan akibat terjadinya gempa bumi antara lain:

(a) Kerusakan jalan dan jembatan dimana jumlah total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp68,7 miliar

(b) Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur kereta api seperti pada jalur utama sebelah selatan mengalami kerusakan kecil, bangunan stasiun, sinyal-sinyal dan telekomunikasi. Jumlah total kerusakan diperkirakan mencapai sekitar Rp20 miliar.

(c) Kerusakan pada Bandar Udara Adi Sucipto seperti keretakan pada landas pacu serta sebuah bangunan terminal penumpang domestik satu lantai runtuh.

(2) Energi

Dalam bidang energi/ketenagalistrikan kerusakan terjadi pada substasiun Pedan. Dimana jumlah total kerugian akibat tidak beroperasinya aliran Pedan-Kediri diperkirakan oleh PLN mencapai

Rp150 miliar dan hal ini juga mengakibatkan 11 substasiun 150KV di Propinsi Yogyakarta menderita kerusakan kecil pada bangunan dimana jumlah total kerusakan mencapai Rp92 miliar.

(3) Pos dan Telekomunikasi

Kerusakan fisik pada instalasi pos dan telekomunikasi terjadi pada kantor pos wilayah Yogyakarta dan kantor sortir pusat, sejumlah kantor cabang dan subcabang serta perumahan staf. Dengan total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai R7 miliar.

(4) Air dan Sanitasi

Jumlah total kerusakan dan kerugian di bidang persediaan air dan sanitasi diperkirakan mencapai Rp85,6 miliar. Sebagian besar kerusakan terjadi pada fasilitas persediaan air dan sumur galian.

2) Sektor Sosial

a) Pendidikan

Untuk bidang pendidikan, jumlah kerusakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun untuk bangunan dan Rp58,8 miliar untuk fasilitas pendidikan, sementara jumlah bangunan dan fasilitas yang rusak di Jawa Tengah sekitar Rp320 miliar, dimana sekitar 60% kerusakan terjadi di Kabupaten Klaten.

b) Kesehatan

Jumlah kerusakan di sektor kesehatan di Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah diperkirakan mencapai sekitar Rp1,5 triliun, sementara jumlah kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp21 miliar.

Praktek dokter dan rumah sakit adalah yang paling terkena dampak, dengan kerusakan dan kerugian mencapai hampir Rp1 triliun.

c) Keagamaan dan Kebudayaan

Jumlah kerusakan bangunan dan properti keagamaan di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp514 miliar, umumnya bangunan swasta. Sementara itu, kerusakan bangunan dan monumen kebudayaan diperkirakan mencapai Rp140 miliar. Kerugian pada umumnya berbentuk hilangnya pendapatan dari pariwisata.

d) Lembaga sosial

Jumlah kerusakan dan kerugian untuk fasilitas-fasilitas ini diperkirakan sekitar Rp43,6 miliar.

3) Sektor Ekonomi Produktif

a) Pertanian dan Irigasi

Kerusakan dan kerugian pada sektor pertanian diperkirakan mencapai Rp689,3 miliar, kerusakan meliputi: sebagian besar infrastruktur irigasi yang mengakibatkan potensi gagal panen yang mencapai hampir 90% dari sektor ini dan kerusakan fasilitas gudang dan penyimpanan.

b) Industri

Seluruh perkiraan kerusakan berjumlah lebih dari Rp4 triliun, belum termasuk kerusakan potensial yang diderita oleh tiga perusahaan besar (PT ASA, PT Budi Makmur, dan PT Sari Husada), kerusakan cukup besar, sampai senilai Rp3,8 triliun. Kerusakan-kerusakan tersebut terutama pada properti tidak bergerak (gedung, dan pada beberapa kasus,

asset yang rusak seperti peralatan), dan inventaris. Kerugian yang diantisipasi di masa depan adalah sekitar Rp3,9 triliun. Kerugian pendapatan diperkirakan atas dasar estimasi penurunan pendapatan, hilangnya kesempatan memperoleh penghasilan.

c) Perdagangan

Kerusakan yang dialami pasar serta fasilitasnya dan pasar modern diperkirakan sekitar Rp183,7 miliar, dan kerugian diperkirakan Rp119,6 miliar. Sehingga, total kerusakan dan kerugian sebesar Rp303,3 miliar. Selain itu, sektor-sektor jasa termasuk restoran dan jasa non-permerintah di perkirakan menderita kerusakan dan kerugian sebesar Rp218 miliar.

d) Pariwisata

Perkiraan kerugian sebesar Rp36 miliar dan hilangnya penghasilan sebesar kira-kira Rp18 miliar. Tempat-tempat wisata yang terkena dampak gempa bumi berlokasi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Provinsi D.I. Yogyakarta) serta Klaten (Jawa Tengah). Tempat tujuan wisata yang paling terkena dampak gempa bumi adalah Kawasan Prambanan dan Makam Raja-Raja di Imogiri, Kabupaten Bantul.

4) Lintas Sektor

a) Sektor Keuangan dan Perbankan

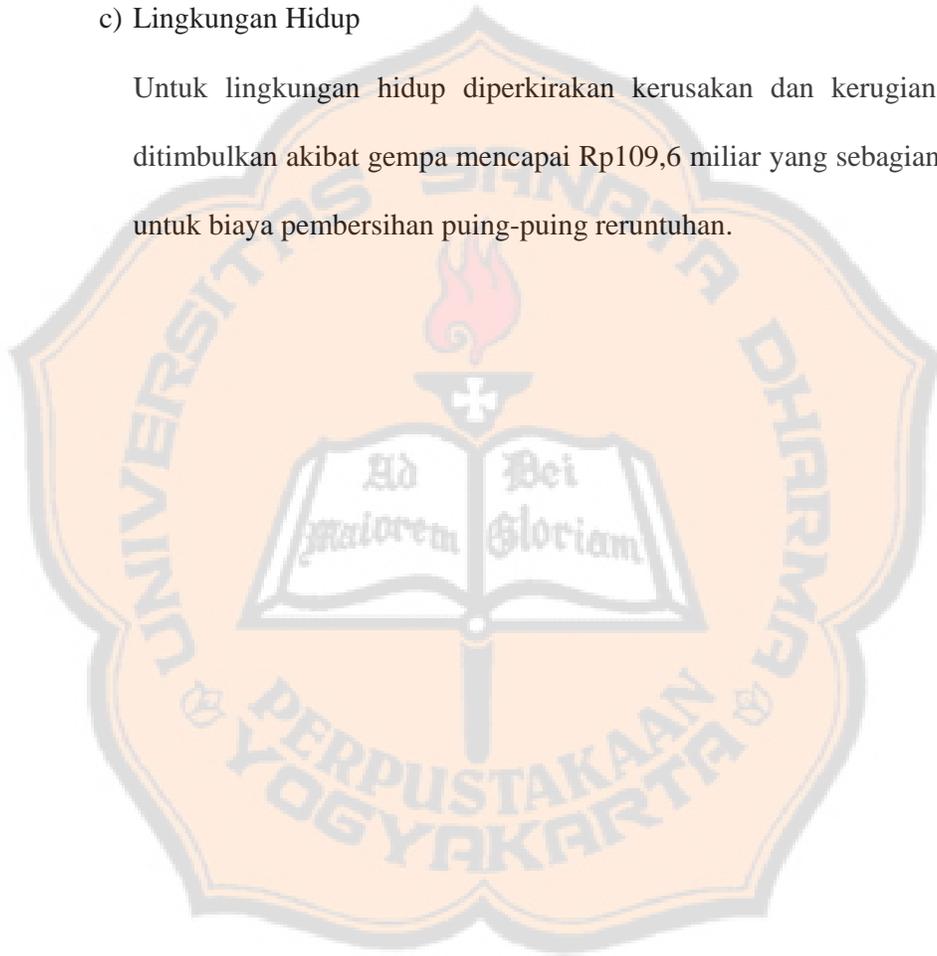
Kerusakan keseluruhan terhadap prasarana dan fasilitas perbankan dapat mencapai Rp37 miliar. Perkiraan kerusakan dan kerugian di Sektor Keuangan Non-Bank adalah sejumlah Rp190 miliar.

b) Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan serta Peradilan

Kerusakan dan kerugian total terhadap struktur-struktur pemerintahan dan administrasi publik di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp137,0 miliar.

c) Lingkungan Hidup

Untuk lingkungan hidup diperkirakan kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat gempa mencapai Rp109,6 miliar yang sebagian besar untuk biaya pembersihan puing-puing reruntuhan.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perbedaan penerimaan Pajak Daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

Dari penelitian ini yang diteliti adalah penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul secara keseluruhan. Karena pajak daerah di Kabupaten Bantul mampu memberikan kontribusi tertinggi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun diprediksi kontribusi ini belum meningkat secara signifikan.

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009. Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah bagian Pajak Daerah Kabupaten Bantul mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009

Tahun	Pajak Daerah	
	Target Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
2003	6.437.296.400,00	6.600.583.794,00
2004	6.651.700.000,00	7.085.891.785,00
2005	7.688.500.000,00	7.837.546.787,00
2006	5.501.466.000,00	9.836.299.528,00
2007	8.104.466.000,00	10.191.535.467,00
2008	9.507.000.000,00	12.070.898.846,00
2009	14.036.000.000,00	14.108.451.478,99

Tabel 3. Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	Target Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
2003	31.364.543.187,76	32.882.358.490,40
2004	32.840.646.613,53	30.777.820.174,23
2005	35.006.940.813,49	37.830.787.663,38
2006	31.779.625.336,79	44.044.788.019,67
2007	46.240.110.245,60	57.229.726.493,62
2008	59.069.544.315,41	69.800.761.508,85
2009	77.286.936.022,99	88.691.362.690,38

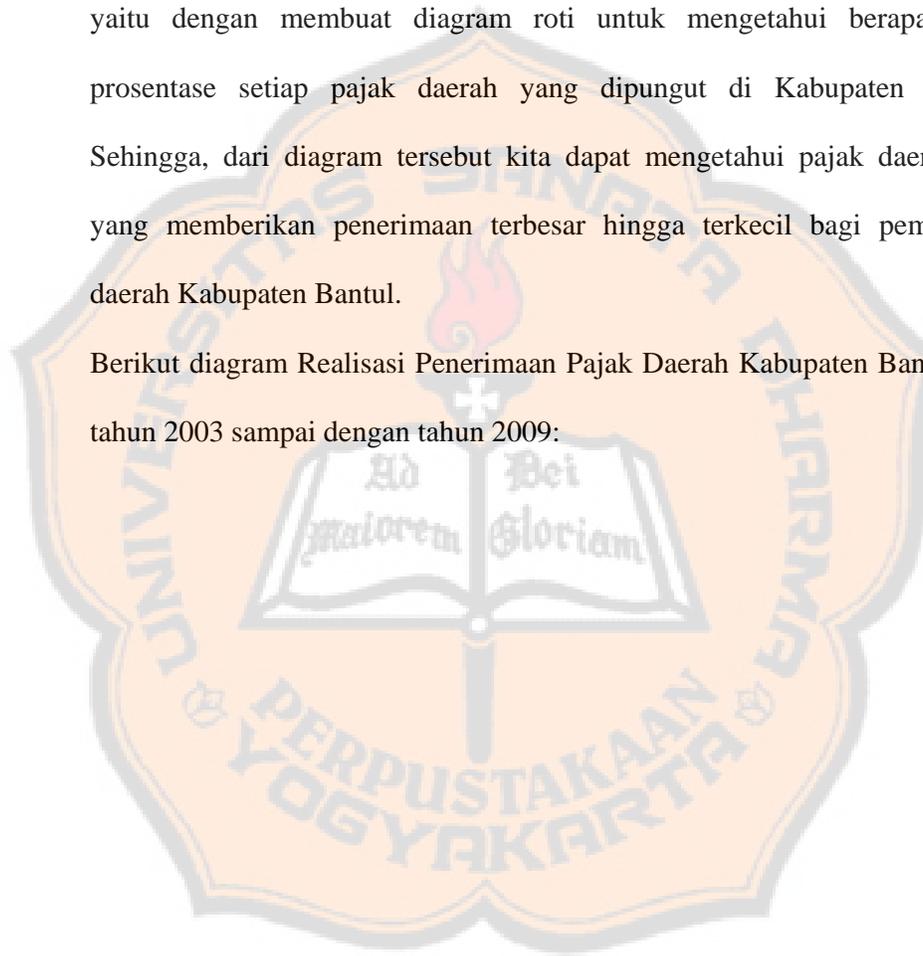
B. Analisis Data dan Pembahasan

Data yang diperoleh tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan berikut :

1. Analisis besarnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.

Untuk mengetahui besar penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yaitu dengan membuat diagram roti untuk mengetahui berapa besar prosentase setiap pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Bantul. Sehingga, dari diagram tersebut kita dapat mengetahui pajak daerah apa yang memberikan penerimaan terbesar hingga terkecil bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Berikut diagram Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009:



Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2003

Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Prosentase
Pajak Hotel	35.333.000,00	0,54%
Pajak Restoran	166.501.755,00	2,52%
Pajak Hiburan	70.157.100,00	1,06%
Pajak Reklame	205.045.050,00	3,11%
Pajak Penerangan Jalan	6.024.204.768,00	91,27%
Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian GoL.C	99.342.121,00	1,51%
Jumlah	6.600.583.794,00	100,00%

Diagram 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2003



Keterangan:

Dari diagram diatas dapat dihasilkan bahwa:

a. Pajak Penerangan Jalan

Pada tahun 2003 Pajak Penerangan Jalan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 1 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Penerangan Jalan yang cukup besar seperti: meningkatnya penggunaan listrik golongan rumah tangga khususnya untuk perabotan rumah tangga yang menggunakan listrik, peningkatan taraf hidup masyarakat dan adanya pelanggan baru.

b. Pajak Reklame

Pada tahun 2003 Pajak Reklame merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 2 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan pada tahun 2003 sebagian penerimaan pajak reklame masih masuk sebagai konsesi atau disebut sebagai Kompensasi Beban Ruang Publik (KBRP) dimana penerimaan tersebut masuk dalam sumbangan pihak ketiga di Laporan Arus Kas di bagian Lain-lain PAD yang sah, meningkatnya pemasangan iklan atau reklame oleh perusahaan-perusahaan.

c. Pajak Restoran

Pada tahun 2003 Pajak Restoran merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 3 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah pengunjung, daya beli meningkat, kesadaran Wajib Pajak Restoran yang semakin meningkat dalam membayar pajak ke Pemerintah Daerah.

d. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pada tahun 2003 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 4 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selalu sama seperti: jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, eksploitasi bertambah dan meningkatnya kebutuhan penduduk akan Bahan Galian Golongan C.

e. Pajak Hiburan

Pada tahun 2003 Pajak Hiburan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 5 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Hiburan yang selalu sama seperti: pengadaan event-event sepanjang tahun.

f. Pajak Hotel

Pada tahun 2003 Pajak Hotel merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 6 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Hotel yang selalu sama seperti: peningkatan jumlah pengunjung yang selalu sama dan tidak adanya perubahan jumlah hotel.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2004

Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Prosentase
Pajak Hotel	36.061.500,00	0,51%
Pajak Restoran	169.212.190,00	2,39%
Pajak Hiburan	84.435.780,00	1,19%
Pajak Reklame	328.629.350,00	4,64%
Pajak Penerangan Jalan	6.343.764.690,00	89,53%
Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian GoL.C	123.788.275,00	1,75%
Pajak Parkir	-	-
Jumlah	7.085.891.785,00	100,00%

Diagram 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2004



Keterangan:

Dari diagram diatas dapat dihasilkan bahwa:

a. Pajak Penerangan Jalan

Pada tahun 2004 Pajak Penerangan Jalan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 1 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Penerangan Jalan yang cukup besar seperti: potensi penggunaan listrik dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang selalu sama.

b. Pajak Reklame

Pada tahun 2004 Pajak Reklame merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 2 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan pada tahun 2004 sebagian penerimaan pajak reklame masih masuk sebagai konsesi atau disebut sebagai Kompensasi Beban Ruang Publik (KBRP) dimana penerimaan tersebut masuk dalam sumbangan pihak ketiga di Laporan Arus Kas di bagian lain-lain PAD yang sah dan meningkatnya pemasangan iklan atau reklame oleh perusahaan-perusahaan.

c. Pajak Restoran

Pada tahun 2004 Pajak Restoran merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 3 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah pengunjung yang selalu sama, daya beli menurun dan adanya Wajib Pajak Restoran yang belum terdata.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

d. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pada tahun 2004 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 4 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selalu sama seperti: pada tahun 2004 adanya pembangunan yang besar di daerah jalan parangtritis yang dulu sebelumnya adalah rawa, pembangunan pasar seni gabusan dan pembangunan GOR.

e. Pajak Hiburan

Pada tahun 2004 Pajak Hiburan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 5 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Hiburan yang selalu sama seperti: pengadaan event-event sepanjang tahun dan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak ke Pemerintah Daerah.

f. Pajak Hotel

Pada tahun 2004 Pajak Hotel merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 6 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Hotel yang selalu sama seperti: peningkatan jumlah pengunjung yang selalu sama dan tidak adanya perubahan jumlah hotel.

g. Pajak Parkir

Pada tahun 2004 pemungutan terhadap Pajak Parkir belum diberlakukan walaupun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak

Parkir telah ada. Hal ini dikarenakan belum diadakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pajak Parkir.



Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005

Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Prosentase
Pajak Hotel	36.900.000,00	0,47%
Pajak Restoran	168.096.815,00	2,14%
Pajak Hiburan	80.002.675,00	1,02%
Pajak Reklame	312.343.100,00	3,99%
Pajak Penerangan Jalan	7.105.268.790,00	90,66%
Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian GoL.C	131.759.907,00	1,68%
Pajak Parkir	3.175.500,00	0,04%
Jumlah	7.837.546.787,00	100,00%

Diagram 3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005



Keterangan:

Dari diagram diatas dapat dihasilkan bahwa:

a. Pajak Penerangan Jalan

Pada tahun 2005 Pajak Penerangan Jalan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 1 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Penerangan Jalan yang cukup besar seperti: meningkatnya penggunaan listrik golongan rumah tangga khususnya untuk perabotan rumah tangga yang menggunakan listrik, peningkatan taraf hidup masyarakat dan adanya pelanggan baru.

b. Pajak Reklame

Pada tahun 2005 Pajak Reklame merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 2 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan order reklame oleh perusahaan-perusahaan, pada tahun 2005 sebagian penerimaan pajak reklame masih masuk sebagai konsesi atau disebut sebagai Kompensasi Beban Ruang Publik (KBRP) dimana penerimaan tersebut masuk dalam sumbangan pihak ketiga di Laporan Arus Kas di bagian lain-lain PAD yang sah dan meningkatnya pemasangan iklan atau reklame oleh perusahaan-perusahaan.

c. Pajak Restoran

Pada tahun 2005 Pajak Restoran merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 3 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah pengunjung, daya beli meningkat, kesadaran Wajib

Pajak Restoran yang semakin meningkat dalam membayar pajak ke Pemerintah Daerah.

d. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pada tahun 2005 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 4 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selalu sama seperti: eksploitasi dan kebutuhan penduduk akan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selalu sama.

e. Pajak Hiburan

Pada tahun 2005 Pajak Hiburan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 5 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Hiburan yang selalu sama seperti: pengadaan event-event sepanjang tahun.

f. Pajak Hotel

Pada tahun 2005 Pajak Hotel merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 6 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Hotel yang selalu sama seperti: peningkatan jumlah pengunjung yang selalu sama dan tidak adanya perubahan jumlah hotel.

g. Pajak Parkir

Pada tahun 2005 Pajak Hotel merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 7 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan Pada tahun 2005

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemungutan Pajak Parkir mulai diberlakukan, walaupun pendapatan yang diterima hanya pendapatan yang ada saja jadi belum ada target



Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006

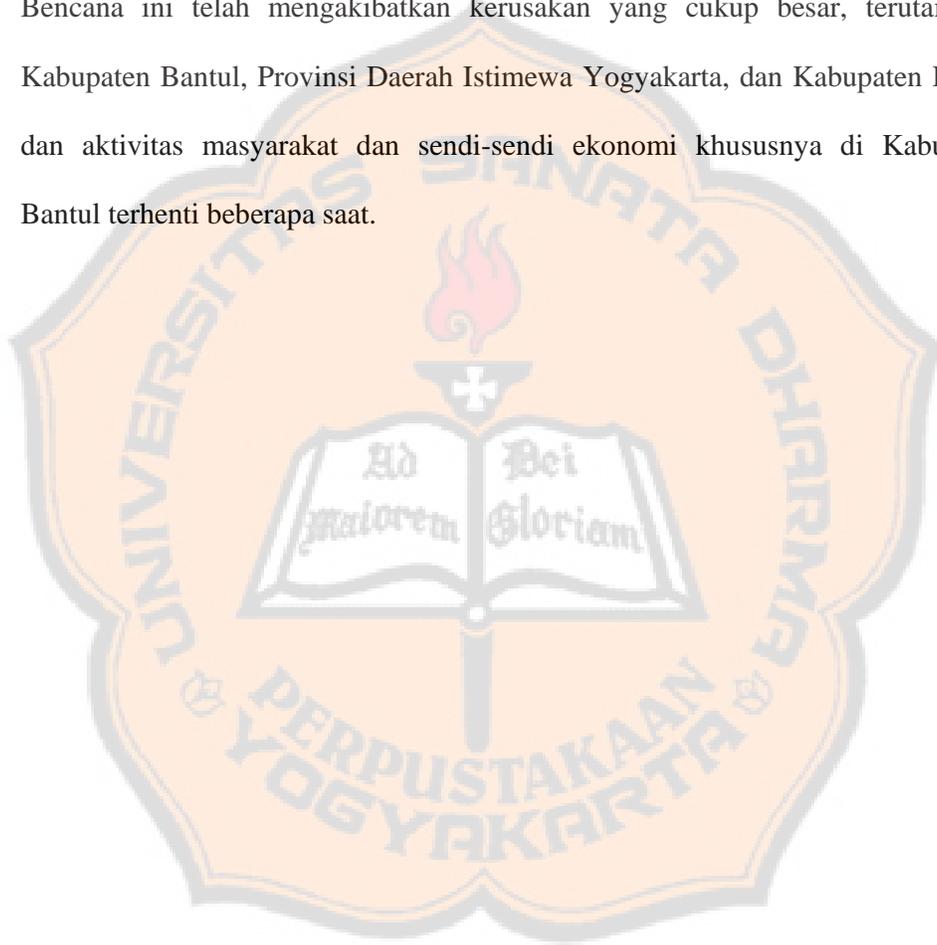
Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Prosentase
Pajak Hotel	22.200.500,00	0,23%
Pajak Restoran	114.888.610,00	1,17%
Pajak Hiburan	70.486.400,00	0,72%
Pajak Reklame	268.114.400,00	2,73%
Pajak Penerangan Jalan	9.195.362.105,00	93,48%
Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian GoL.C	162.634.513,00	1,65%
Pajak Parkir	2.613.000,00	0,03%
Jumlah	9.836.299.528,00	100,00%

Diagram 4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006



Keterangan:

Pada tanggal 27 Mei 2006 telah terjadi gempa bumi, dimana letak pusat gempa tersebut berjarak hanya sekitar 35 km dari kota Yogyakarta. Gempa dirasakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Bencana ini telah mengakibatkan kerusakan yang cukup besar, terutama di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Klaten dan aktivitas masyarakat dan sendi-sendi ekonomi khususnya di Kabupaten Bantul terhenti beberapa saat.



Tabel 8. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2007

Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Prosentase
Pajak Hotel	40.990.000,00	0,40%
Pajak Restoran	121.054.600,00	1,19%
Pajak Hiburan	71.131.950,00	0,70%
Pajak Reklame	377.650.950,00	3,71%
Pajak Penerangan Jalan	9.371.924.175,00	91,96%
Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian GoL.C	204.850.792,00	2,01%
Pajak Parkir	3.933.000,00	0,04%
Jumlah	10.191.535.467,00	100,00%

Diagram 5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2007



Keterangan:

Dari diagram diatas dapat dihasilkan bahwa:

a. Pajak Penerangan Jalan

Pada tahun 2007 Pajak Penerangan Jalan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 1 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Penerangan Jalan yang cukup besar seperti: meningkatnya penggunaan listrik golongan rumah tangga khususnya untuk perabotan rumah tangga yang menggunakan listrik dan adanya pelanggan baru.

b. Pajak Reklame

Pada tahun 2007 Pajak Reklame merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 2 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan order reklame oleh perusahaan-perusahaan, setelah tahun 2005 penerimaan Reklame telah masuk ke dalam penerimaan Pajak Daerah bagian Pajak Reklame sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Reklame mengalami peningkatan.

c. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pada tahun 2007 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 3 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya rekonstruksi pasca gempa.

d. Pajak Restoran

Pada tahun 2007 Pajak Restoran merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 4 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah pengunjung, daya beli menurun kondisi yang terjadi pasca gempa.

e. Pajak Hiburan

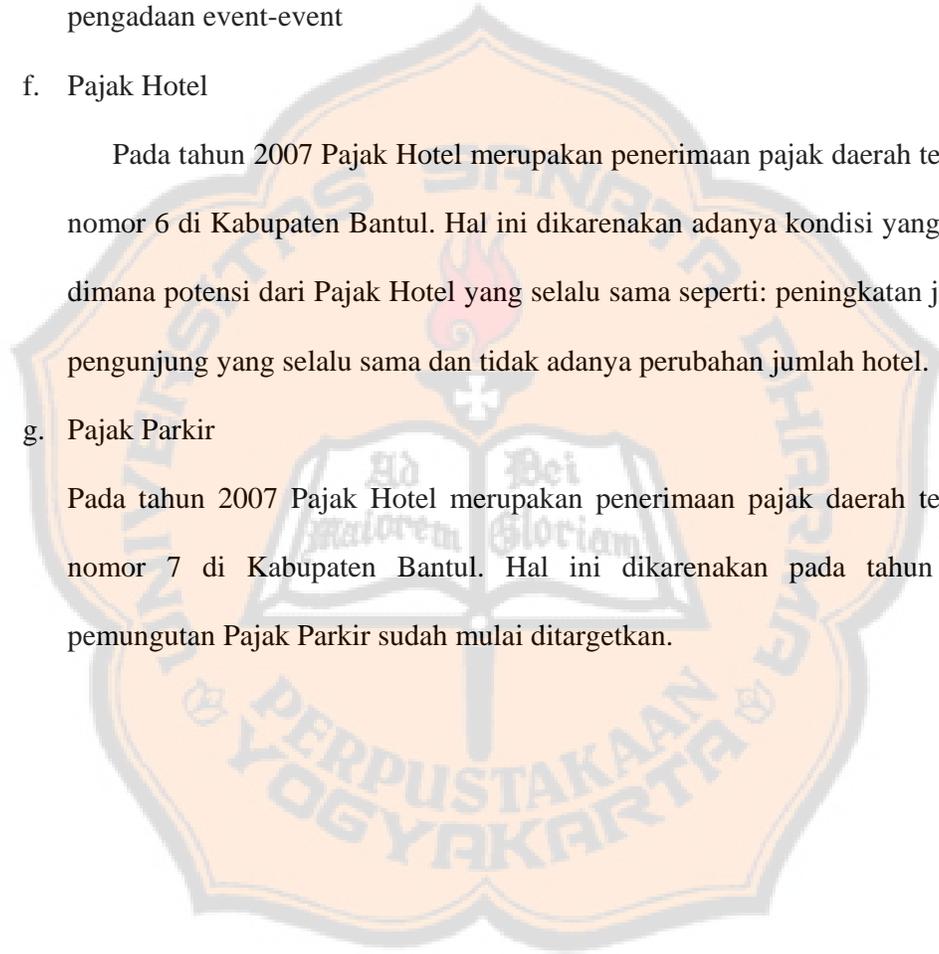
Pada tahun 2007 Pajak Hiburan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 5 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kondisi yang terjadi pasca gempa dan mulai aktifnya Jogja Expo Center (JEC) untuk pengadaaan event-event

f. Pajak Hotel

Pada tahun 2007 Pajak Hotel merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 6 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Hotel yang selalu sama seperti: peningkatan jumlah pengunjung yang selalu sama dan tidak adanya perubahan jumlah hotel.

g. Pajak Parkir

Pada tahun 2007 Pajak Hotel merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 7 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan pada tahun 2007 pemungutan Pajak Parkir sudah mulai ditargetkan.



Tabel 9. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2008

Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Prosentase
Pajak Hotel	37.455.000,00	0,31%
Pajak Restoran	149.261.025,00	1,24%
Pajak Hiburan	77.380.700,00	0,64%
Pajak Reklame	415.753.000,00	3,44%
Pajak Penerangan Jalan	10.834.709.060,00	89,76%
Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian GoL.C	543.959.061,00	4,51%
Pajak Parkir	12.381.000,00	0,10%
Jumlah	12.070.898.846,00	100,00%

Diagram 6. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2008



Keterangan:

Dari diagram diatas dapat dihasilkan bahwa:

a. Pajak Penerangan Jalan

Pada tahun 2008 Pajak Penerangan Jalan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 1 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Penerangan Jalan yang cukup besar dan pada tahun 2008 masyarakat Bantul masih banyak yang membangun.

b. Pajak Reklame

Pada tahun 2008 Pajak Reklame merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 2 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah order reklame yang selalu sama.

c. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pada tahun 2008 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 3 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan masih adanya rekonstruksi pasca gempa dimana sebagian besar masyarakat banyak yang membangun dan adanya bantuan dana untuk membangun pasca gempa.

d. Pajak Restoran

Pada tahun 2008 Pajak Restoran merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 4 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Bantul banyak yang membangun kembali rumah mereka akibat gempa sehingga, mengakibatkan daya beli menurun dan jumlah pengunjung restoran berkurang.

e. Pajak Hiburan

Pada tahun 2008 Pajak Hiburan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 5 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Hiburan yang selalu sama.

f. Pajak Hotel

Pada tahun 2008 Pajak Hotel merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 6 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Hotel yang selalu sama seperti: peningkatan jumlah pengunjung yang selalu sama, adanya hotel yang ditutup, waji pajak hotel yang dulu di data sekarang tidak dan adanya isu bahwa akan terjadi gempa lagi pada tahun 2008.

g. Pajak Parkir

Pada tahun 2008 Pajak Parkir merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 7 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan semakin luasnya potensi yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir.

Tabel 10. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2009

Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Prosentase
Pajak Hotel	48.340.000,00	0,34%
Pajak Restoran	188.874.430,00	1,34%
Pajak Hiburan	91.851.050,00	0,65%
Pajak Reklame	1.244.917.012,99	8,82%
Pajak Penerangan Jalan	12.138.890.000,00	86,04%
Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian GoL.C	378.934.486,00	2,69%
Pajak Parkir	16.644.500,00	0,12%
Jumlah	14.108.451.478,99	100,00%

Diagram 7. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2009



Keterangan:

Dari diagram diatas dapat dihasilkan bahwa:

a. Pajak Penerangan Jalan

Pada tahun 2009 Pajak Penerangan Jalan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 1 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Penerangan Jalan yang cukup besar dan potensi dari Pajak Penerangan Jalan yang selalu sama.

b. Pajak Reklame

Pada tahun 2009 Pajak Reklame merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 2 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan order reklame, meningkatnya kesadaran Wajib Pajak Reklame dalam membayar pajak dan adanya kenaikan tarif Pajak Reklame akibat diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang baru.

c. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pada tahun 2009 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 3 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kondisi yang sudah normal pasca gempa.

d. Pajak Restoran

Pada tahun 2009 Pajak Restoran merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 4 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Bantul banyak yang membangun kembali rumah mereka akibat

gempa sehingga, mengakibatkan daya beli menurun dan jumlah pengunjung restoran berkurang.

e. Pajak Hiburan

Pada tahun 2009 Pajak Hiburan merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 5 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Hiburan yang selalu sama.

f. Pajak Hotel

Pada tahun 2009 Pajak Hotel merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 6 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Hotel yang selalu sama seperti: peningkatan jumlah pengunjung yang selalu sama dan adanya hotel baru.

g. Pajak Parkir

Pada tahun 2009 Pajak Hotel merupakan penerimaan pajak daerah terbesar nomor 7 di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dan semakin luasnya potensi yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir.

2. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006

Dalam menjawab permasalahan ini, akan dilakukan dengan cara yaitu:

a. Langkah pertama yaitu dengan uji normalitas data

Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS 18 *for windows* melalui *Kolmogorov-Smirnov Test*. Dalam hal ini data yang

baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005:18). Data yang terdistribusi normal atau mendekati normal jika nilai *p-value* pada kolom *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05.

Tabel 13. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Penerimaan_Pajak_Daerah
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	9.6492E9
	Std. Deviation	3.00634E9
Most Extreme Differences	Absolute	.227
	Positive	.227
	Negative	-.155
Kolmogorov-Smirnov Z		.555
Asymp. Sig. (2-tailed)		.918

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk variabel penerimaan pajak daerah 0,555 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,918 > 0,05 sehingga, dapat dikatakan bahwa variabel penerimaan pajak daerah berdistribusi normal.

b. Langkah Kedua

Setelah melakukan uji normalitas data, maka untuk menjawab permasalahan kedua menggunakan perhitungan secara manual dan dengan menggunakan program SPSS

1) Perhitungan secara manual

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penerimaan Pajak Daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006, maka digunakan analisis uji beda dua rata-rata sampel. Dimana data yang dipakai untuk

membandingkan ada tidaknya perbedaan penerimaan Pajak Daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 dapat dilihat pada tabel 12 dan tabel 13 berikut:

Tabel 12. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2005 (Sebelum Gempa 27 Mei 2006).

Tahun	Pajak Daerah	
	Target Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
2003	6.437.296.400,00	6.600.583.794,00
2004	6.651.700.000,00	7.085.891.785,00
2005	7.688.500.000,00	7.837.546.787,00

Tabel 13. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 (Sesudah Gempa 27 Mei 2006).

Tahun	Pajak Daerah	
	Target Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
2007	8.104.466.000,00	10.191.535.467,00
2008	9.507.000.000,00	12.070.898.846,00
2009	14.036.000.000,00	14.108.451.478,99

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menjawab permasalahan kedua sebagai berikut (Riduwan, 2008: 215-216):

a) Membuat rumusan hipotesis

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ = Tidak ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ = Ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

Keterangan:

μ_1 = rata-rata penerimaan pajak daerah sebelum gempa 27 Mei 2006.

μ_2 = rata-rata penerimaan pajak daerah sesudah gempa 27 Mei 2006.

b) Menentukan tingkat nyata (α)

Taraf nyata yang digunakan sebesar 5% (0,05)

c) Menentukan t_{tabel}

Untuk menentukan derajat kebebasan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} d_f &= n_1 + n_2 - 2 \\ &= 3 + 3 - 2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Dimana $t_{tabel} = (d_f; \alpha/2)$

$$\begin{aligned} \text{Nilai } t_{tabel} &= (4; 0,025) \\ &= \pm 2,776 \end{aligned}$$

d) Mencari t_{hitung}

Rumus t_{hitung} sebagai berikut

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 + n_2 - 2)} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Menghitung standar deviasi

Sebelum melakukan pengujian uji t maka, terlebih dahulu menghitung uji beda rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah

sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 (X) dan jumlah kuadrat selisih beda rata-rata $(X - \bar{X})^2$

Dalam hal ini penghitungan dilakukan dengan Microsoft Excel sebagai berikut:

Tabel 14. Penghitungan rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah sebelum gempa 27 Mei 2006.

Tahun	X	$(X - \bar{X}_1)$	$(X - \bar{X}_1)^2$
2003	6,600,583,794.00	-574,090,328.00	329,579,704,703,148,000.00
2004	7,085,891,785.00	-88,782,337.00	7,882,303,363,181,570.00
2005	7,837,546,787.00	662,872,665.00	439,400,170,004,202,000.00
$\Sigma X_1 = 21,524,022,366.00$ $\bar{X}_1 = 7,174,674,122.00$ $(X - \bar{X}_1)^2 = 776,862,178,070,531,000.00$			

Rumus menghitung standar deviasi (SD)

$$\begin{aligned}
 s_1 &= \sqrt{\frac{(\Sigma X - \bar{X}_1)^2}{n-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{776.862.178.070.531.000,00}{3-1}} \\
 &= 623.242.399,90
 \end{aligned}$$

Tabel 15. Penghitungan rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah sesudah gempa 27 Mei 2006.

Tahun	X	$(X - \bar{X}_2)$	$(X - \bar{X}_2)^2$
2007	10,191,535,467.00	-1,932,093,130.33	3,732,983,864,268,380,000.00
2008	12,070,898,846.00	-52,729,751.33	2,780,426,675,323,630.00
2009	14,108,451,478.99	1,984,822,881.66	3,939,521,871,561,110,000.00
$\sum X_2$	= 36,370,885,791.99		
\bar{X}_2	= 12,123,628,597.33		
$(X - \bar{X}_2)^2$	= 7,675,286,162,504,810,000.00		

Rumus menghitung standar deviasi (SD)

$$s_2 = \sqrt{\frac{\sum X - \bar{X}_2)^2}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{7.675.286.162.504.810.000,00}{3-1}}$$

$$= 1.958.990.321,88$$

Setelah diketahui nilai standar deviasi penerimaan pajak daerah sebelum gempa 27 Mei 2006 (s_1) sesudah gempa 27 Mei 2006 (s_2) maka, kemudian mencari t_{hitung} dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 + n_2 - 2)} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$$= \frac{7,174,674,122.00 - 12,123,628,597.33}{\sqrt{\frac{(2-1)388.431.089.033.111.000,00 + (2-1)3.837.643.081.219.510.000,00}{(2+2-2)} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right)}}$$

$$= \frac{-4,948,954,475.33}{\sqrt{\frac{(2)388.431.089.033.111.000,00 + (2)3.837.643.081.219.510.000,00}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right)}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{-4.948.954.475,33}{\sqrt{\frac{776.862.178.066.223.000,00 + 7.675.286.162.439.010.000,00}{4}} \sqrt{0,666666667}} \\
 &= \frac{-4.948.954.475,33}{\sqrt{2.113.037.085.126.310.000,00} \sqrt{0,666666667}} \\
 &= \frac{-4.948.954.475,33}{1.453.628.936,00 \times 0,81649658} \\
 &= \frac{-4.948.954.475,33}{1.186.883.055,00} \\
 &= -4,170
 \end{aligned}$$

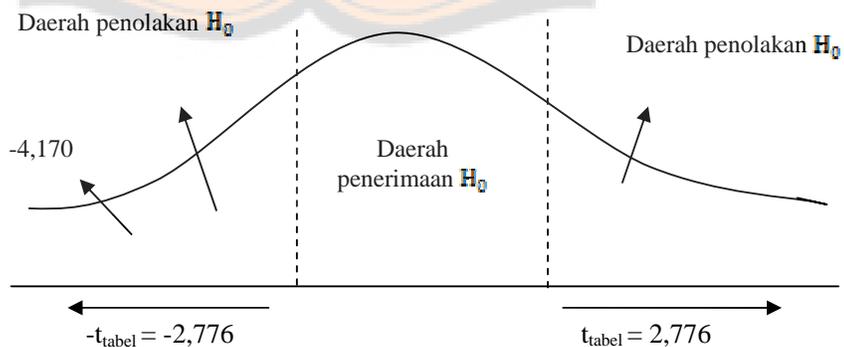
e) Menentukan kriteria pengujian

H_0 diterima, jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq +t_{tabel}$; artinya tidak ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

H_0 ditolak, jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$; artinya ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

f) Membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel}

Ternyata: $-4,170 > -2,776$ maka, H_0 ditolak



Gambar III: Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0

g) Mengambil kesimpulan

Karena $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, yaitu $-4,170 > -2,776$, maka H_0 ditolak; artinya ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

2) Menghitung dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Untuk penelitian kali ini menggunakan program *SPSS 18 for Windows* yaitu dengan menggunakan *Independent-Sample t Test*. Adapun langkah-langkah dalam mengambil kesimpulan hasil SPSS yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2008: 57-58):

Dalam menganalisis output *Independent-Sample Test*, ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan yaitu:

a) Pertama adalah pengujian untuk mengetahui apakah varians populasi identik ataukah tidak yaitu dengan melihat nilai *Levene Test*.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

(1) Hipotesis

H_0 = Kedua varians populasi adalah identik (variens populasi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 adalah sama).

H_a = Kedua varians populasi adalah tidak identik (variens populasi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 adalah berbeda).

(2) Pengambilan keputusan

Dasar pengambilan keputusan

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka, H_0 diterima artinya kedua varians adalah sama.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka, H_0 ditolak artinya kedua varians adalah berbeda.

(3) Menarik keputusan

Terlihat dari output SPSS bahwa nilai F hitung *levене test* sebesar 1,783 dengan probabilitas 0,253 karena probabilitas $> 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau kedua varians adalah sama (variens populasi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 adalah sama). Dengan demikian, analisis uji beda *t-test* harus menggunakan asumsi *Equal variances assumed*.

b) Kedua adalah analisis output dengan memakai *t-test*

Adapun langkah-langkahnya adalah:

(1) Hipotesis

H_0 = Tidak ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

H_a = Ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(2) Pengambilan keputusan

(a) Berdasar perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}

- Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq +t_{tabel}$ maka, H_0 diterima artinya tidak ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.
- Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka, H_0 ditolak artinya ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(b) Berdasar nilai probabilitas

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka, H_0 diterima artinya tidak ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka, H_0 ditolak artinya ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(3) Menarik keputusan

Terlihat dari output SPSS bahwa t_{hitung} pada equal variance assumed adalah $-4,170 > t_{tabel}$ adalah $-2,776$ dengan nilai probabilitas $0,014 < 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

Jadi, melalui kedua metode penghitungan ini telah ditemukan kesimpulan bahwa ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. Adapun penyebab sehingga ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 yaitu dapat dilihat terutama pada:

(1) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pada waktu setelah terjadinya gempa prosentase penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun, meningkatnya kebutuhan penduduk akan Bahan Galian Golongan C, pada tahun 2008 sebagian penduduk banyak yang membangun pasca gempa dan adanya bantuan untuk membangun bangunan yang roboh atau rusak akibat gempa bumi.

(2) Pajak Parkir

Pada waktu setelah terjadinya gempa prosentase penerimaan Pajak Parkir mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2007 penerimaan Pajak Parkir mulai ditargetkan, meningkatnya kesadaran Wajib Pajak Parkir dalam membayar Pajak Parkir dan semakin luasnya potensi yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir.

3. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Bantul dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul dari tahun 2003 sampai dengan tahun

2009 maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Daerah}_n}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}_n} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut, maka dapat dihitung kontribusi pajak daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

a. Prosentase kontribusi pajak daerah tahun 2003

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{6.600.583.794,00}{32.882.358.490,40} \times 100\% \\ &= 20,07\% \end{aligned}$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2003 sebesar

20,07%.

b. Prosentase kontribusi pajak daerah tahun 2004

$$\text{Kontribusi} = \frac{7.085.891.785,00}{30.777.820.174,23} \times 100\%$$

$$= 23,02\%$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2004 sebesar

23,02% naik dari tahun sebelumnya sebesar 2,95%.

- c. Prosentase kontribusi pajak daerah tahun 2005

$$\text{Kontribusi} = \frac{7.837.546.787,00}{37.830.787.663,38} \times 100\%$$

$$= 20,72\%$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2005 sebesar 20,72% turun dari tahun sebelumnya sebesar 2,30%.

- d. Prosentase kontribusi pajak daerah tahun 2006

$$\text{Kontribusi} = \frac{9.836.299.528,00}{44.044.788.019,67} \times 100\%$$

$$= 22,33\%$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2006 sebesar 22,33% naik dari tahun sebelumnya sebesar 1,61%.

- e. Prosentase kontribusi pajak daerah tahun 2007

$$\text{Kontribusi} = \frac{10.191.535.467,00}{57.229.726.493,62} \times 100\%$$

$$= 17,81\%$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2007 sebesar 17,81% turun dari tahun sebelumnya sebesar 4,52%.

- h. Prosentase kontribusi pajak daerah tahun 2008

$$\text{Kontribusi} = \frac{12.070.898.846,00}{69.800.761.508,85} \times 100\%$$

$$= 17,29\%$$

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2008 sebesar 17,29% turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,52%.

- i. Prosentase kontribusi pajak daerah tahun 2009

$$\text{Kontribusi} = \frac{14.108.451.478,99}{88.691.362.690,38} \times 100\%$$

$$= 15,91\%$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2009 sebesar 15,91% turun dari tahun sebelumnya sebesar 1,38%.

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini:

Tabel 16: Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2003	6.600.583.794,00	32.882.358.490,40	20,07%
2004	7.085.891.785,00	30.777.820.174,23	23,02%
2005	7.837.546.787,00	37.830.787.663,38	20,72%
2006	9.836.299.528,00	44.044.788.019,67	22,33%
2007	10.191.535.467,00	57.229.726.493,62	17,81%
2008	12.070.898.846,00	69.800.761.508,85	17,29%
2009	14.108.451.478,99	88.691.362.690,38	15,91%

Sumber: Data Primer diolah

Keterangan:

- a. Hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel 16 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2009

- b. berkisar antara **15,91% – 23,02%**. Dimana rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 adalah 19,59%.
- c. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar terjadi pada tahun 2004 dengan kontribusi sebesar 23,02%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penerimaan bunga deposito pada bagian lain-lain PAD yang sah sebesar Rp2.262.857.934,00 dari tahun sebelumnya.
- d. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkecil terjadi pada tahun 2009 dengan kontribusi sebesar 15,91%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada pos retribusi terutama untuk retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp19.535.156.447,00, retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp2.181.773.900,00; pos bagian laba perusahaan milik daerah terutama PD. Bank Bantul sebesar Rp1.044.468.348,97, PD. Aneka Dharma sebesar Rp23.000.000,00, BUPK sebesar Rp32.493.206,36, Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp2.962.961.671,00 dan pos Lain-lain PAD yang sah terutama penjualan peralatan/perlengkapan kantor sebesar Rp180.226.000,00, pendapatan denda perijinan tertentu sebesar Rp604.645.000,00 dan penerimaan lain-lain sebesar Rp1.409.018.331,00 dari tahun sebelumnya.



Diagram 8: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4. Analisis Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006

Dalam menjawab permasalahan ini, akan dilakukan dengan cara yaitu:

a. Langkah pertama

Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS 18 *for windows* melalui *Kolmogorov-Smirnov Test*. Dalam hal ini data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005:18). Data yang terdistribusi normal atau mendekati normal jika nilai *p-value* pada kolom *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05.

Tabel 17. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Kontribusi_Pajak_Daerah
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19.1367
	Std. Deviation	2.60921
Most Extreme	Absolute	.194
Differences	Positive	.194
	Negative	-.140
Kolmogorov-Smirnov Z		.476
Asymp. Sig. (2-tailed)		.977

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk variabel kontribusi pajak daerah 0,476 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,977 > 0,05 sehingga, dapat dikatakan bahwa variabel kontribusi pajak daerah berdistribusi normal.

b. Langkah kedua

Setelah melakukan uji normalitas data, maka untuk menjawab permasalahan kedua menggunakan perhitungan secara manual dan dengan menggunakan program SPSS.

1) Perhitungan secara manual

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006, maka digunakan analisis uji beda dua rata-rata sampel. Dimana data yang dipakai untuk membandingkan ada tidaknya perbedaan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 dapat dilihat pada tabel 18 dan tabel 19 berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 18. Realisasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2005 (Sebelum Gempa 27 Mei 2006).

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2003	6.600.583.794,00	32.882.358.490,40	20,07%
2004	7.085.891.785,00	30.777.820.174,23	23,02%
2005	7.837.546.787,00	37.830.787.663,38	20,72%

Tabel 19. Realisasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 (Sesudah Gempa 27 Mei 2006).

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2007	10.191.535.467,00	57.229.726.493,62	17,81%
2008	12.070.898.846,00	69.800.761.508,85	17,29%
2009	14.108.451.478,99	88.691.362.690,38	15,91%

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menjawab permasalahan keempat sebagai berikut (Riduwan, 2008: 215-216):

a) Membuat rumusan hipotesis

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ = Tidak ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ = Ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

Keterangan:

μ_1 = rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum gempa 27 Mei 2006.

μ_2 = rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah gempa 27 Mei 2006.

b) Menentukan tingkat nyata

Taraf nyata yang digunakan sebesar 5% (0,05).

c) Menentukan t_{tabel}

Untuk menentukan derajat kebebasan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} d_f &= n_1 + n_2 - 2 \\ &= 3 + 3 - 2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Dimana $t_{tabel} = (d_f, \alpha/2)$

$$\begin{aligned} \text{Nilai } t_{tabel} &= (4, 0,025) \\ &= \pm 2,776 \end{aligned}$$

d) Mencari t_{hitung}

Rumus t_{hitung} sebagai berikut

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 + n_2 - 2)} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}}$$

Menghitung standar deviasi

Sebelum melakukan pengujian uji t maka, terlebih dahulu menghitung uji beda rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 (\bar{X}) dan jumlah kuadrat selisih beda rata-rata $(X - \bar{X})^2$. Dalam hal ini penghitungan dilakukan dengan Microsoft Excel sebagai berikut:

Tabel 20. Penghitungan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum gempa 27 Mei 2006.

Tahun	X	$(X - \bar{X}_1)$	$(X - \bar{X}_1)^2$
2003	20.07	-1.2	1.44
2004	23.02	1.75	3.063
2005	20.72	-0.55	0.303
$\sum X_1 = 63.81$ $\bar{X}_1 = 21.2700$ $(X - \bar{X}_1)^2 = 4.806$			

Rumus menghitung standar deviasi (SD)

$$\begin{aligned}
 s_1 &= \sqrt{\frac{(\sum X - \bar{X}_1)^2}{n-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{4.806}{3-1}} \\
 &= 1,550
 \end{aligned}$$

Tabel 21. Penghitungan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah gempa 27 Mei 2006.

Tahun	X	$(X - \bar{X}_2)$	$(X - \bar{X}_2)^2$
2007	17.81	0.807	0.65076
2008	17.29	0.287	0.0822
2009	15.91	-1.09	1.1953
$\sum X_2$	= 51.01		
\bar{X}_2	= 17.0033		
$(X - \bar{X}_2)^2$	= 1.92826667		

Rumus menghitung standar deviasi (SD)

$$\begin{aligned}
 s_2 &= \sqrt{\frac{(\sum X - \bar{X}_2)^2}{n-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{1,92826667}{3-1}} \\
 &= 0,982
 \end{aligned}$$

Setelah diketahui nilai standar deviasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum gempa 27 Mei 2006 (s_1) sesudah gempa 27 Mei 2006 (s_2) maka, kemudian mencari t_{hitung} dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 + n_2 - 2)} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}} \\
 &= \frac{21,2700 - 17,0033}{\sqrt{\frac{(3-1)2,4025 + (3-1)0,964128}{(3+3-2)} \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}}} \\
 &= \frac{4,2667}{\sqrt{\frac{(2)2,4025 + (2)0,964324}{4} \sqrt{\frac{2}{3}}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{4,2667}{\sqrt{\frac{4,808+1,928648}{4} \sqrt{0,666666667}}} \\
 &= \frac{4,2667}{\sqrt{1,683412} \sqrt{0,666666667}} \\
 &= \frac{4,2667}{1,29746368 \times 0,81649658} \\
 &= \frac{4,2667}{1,059374657} \\
 &= 4,028
 \end{aligned}$$

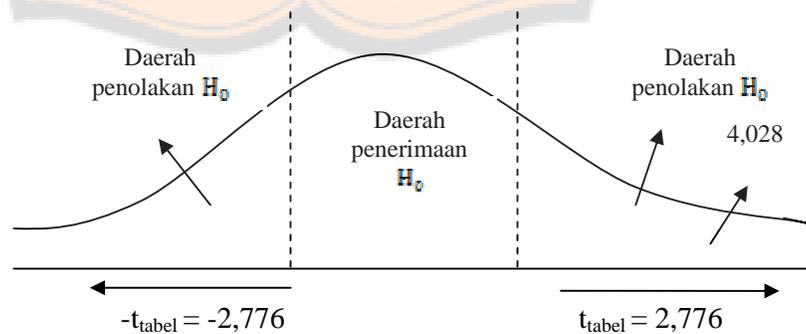
e) Menentukan kriteria pengujian

H_0 diterima, jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq +t_{tabel}$; artinya tidak ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

H_0 ditolak, jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$; artinya ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

f) Membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel}

Ternyata: $4,028 > 2,776$ maka, H_0 ditolak



Gambar IV: Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0

g) Mengambil kesimpulan

Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $4,028 > 2,776$, maka H_0 ditolak; artinya ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

2) Menghitung dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Untuk penelitian kali ini menggunakan program *SPSS 18 for Windows* yaitu dengan menggunakan *Independent-Sample t Test*. Adapun langkah-langkah dalam mengambil kesimpulan hasil SPSS yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2008: 57-58):

Dalam menganalisis output *Independent-Sample Test*, ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan yaitu:

a) Pertama adalah pengujian untuk mengetahui apakah varians populasi identik atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Levene Test*.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

(1) Hipotesis

H_0 = Kedua varians populasi adalah identik (variens populasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 adalah sama).

H_a = Kedua varians populasi adalah tidak identik (variens populasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 adalah berbeda).

(2) Pengambilan keputusan

Dasar pengambilan keputusan

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka, H_0 diterima artinya kedua varians adalah sama.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka, H_0 ditolak artinya kedua varians adalah berbeda.

(3) Menarik keputusan

Terlihat dari output SPSS bahwa nilai F hitung *levene test* sebesar 1,089 dengan probabilitas 0,356 karena probabilitas $> 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau kedua varians adalah sama (variens populasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 adalah sama). Dengan demikian, analisis uji beda *t-test* harus menggunakan asumsi *Equal variances assumed*.

b) Kedua adalah analisis output dengan memakai *t-test*

Adapun langkah-langkahnya adalah:

(1) Hipotesis

H_0 = Tidak ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

H_a = Ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(2) Pengambilan keputusan

(a) Berdasar perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}

- Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq +t_{tabel}$ maka, H_0 diterima artinya tidak ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

- Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka, H_0 ditolak artinya ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(b) Berdasar nilai probabilitas

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka, H_0 diterima artinya tidak ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

- Jika probabilitas $< 0,05$ maka, H_0 ditolak artinya ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

(c)Menarik keputusan

Terlihat dari output SPSS bahwa t_{hitung} pada *equal variance assumed* adalah $4,028 > t_{tabel}$ adalah 2,776 dengan nilai probabilitas $0,016 < 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

Jadi, melalui kedua metode penghitungan ini telah ditemukan kesimpulan bahwa ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. Adapun penyebab sehingga ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 dikarenakan prosentase kenaikan pajak daerah lebih kecil daripada prosentase pada pos-pos lain pada Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah sehingga, hal ini dapat mempengaruhi kontribusi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada diagram penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 dapat diketahui bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan penerimaan Pajak Daerah terbesar di Kabupaten Bantul sedangkan, Pajak Parkir merupakan penerimaan Pajak Daerah terkecil di Kabupaten Bantul.
2. Dari perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 dimana $\Delta_{hitung} > \Delta_{tabel}$, yaitu $-4,170 > -2,776$. Adapun penyebab sehingga ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 yaitu pada prosentase penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir setelah gempa mengalami kenaikan.
3. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 23,02% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 15,91%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2003 sebesar 20,07%, tahun 2005 sebesar 20,72%, tahun 2007 sebesar 17,81% dan tahun 2008 sebesar 17,29%.

4. Dari perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $4,028 > 2,776$. Adapun penyebab sehingga ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006 yaitu prosentase kenaikan pajak daerah lebih kecil daripada prosentase pada pos-pos lain pada Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah sehingga, hal ini dapat mempengaruhi kontribusi.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis memiliki keterbatasan yaitu kurang lengkapnya hasil wawancara mengenai keterangan besarnya penerimaan masing-masing Pajak Daerah. Kurang lengkapnya keterangan ini dikarenakan keterangan yang diperoleh hanya secara umum. Sehingga, hasil yang diperoleh kurang spesifik.

C. Saran

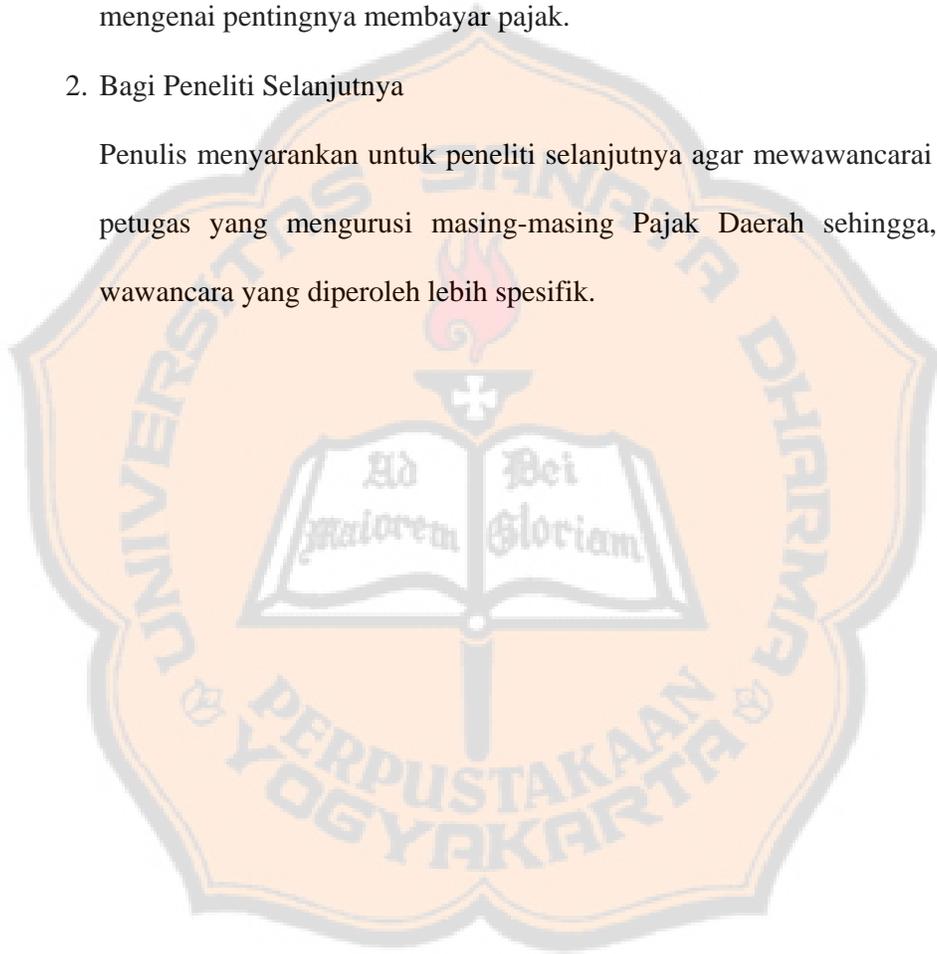
Setelah melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, penulis ingin mencoba memberikan masukan dan saran. Semoga masukan dan saran ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan bagi peneliti selanjutnya.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah supaya tetap mempertahankan serta berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama disektor Pajak Daerah yaitu dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar mewawancarai setiap petugas yang mengurus masing-masing Pajak Daerah sehingga, hasil wawancara yang diperoleh lebih spesifik.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Atmaja, Lukas Setia. 2009. *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT Indeks.
- Dharma, Siwage dan Pakasa Bary. 2008. Bencana Alam: Dampak dan Penanganan Sosial Ekonomi. *Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. Jilid XXXIV, No. 1. Hal. 115-134.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handoko, Agustinus. 2007. Analisis Perkembangan dan Perbedaan Penerimaan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002. *Skripsi S-I*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Hartono, Jogyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFPE.
- Junita Manurug, Melda. 2009. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Gempa Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi-SI*. Yogyakarta: Universitas Kristen Budya Wacana. <http://sinta.ukdw.ac.id/sinta/resources/sintasrv/nim/12030243>. (Diakses pada tanggal 24 April 2011).
- Kountour, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Skripsi dan Thesis*. Jakarta: PPM.
- Mahsun, M., Firma, S dan Heribertus A.P. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan: Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Pratiwi Budi Haryani, Yacinta Dian. 2009. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006. *Skripsi-S1*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. 2006. Buku tentang *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah*. http://bencana.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=65. (Diakses pada tanggal 24 April 2011).
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 08A Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pajak Parkir.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Volume 7, No. 2, hal 49-57. http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/02-Kontribusi_Riduansyah.pdf. (Diakses pada tanggal 14 Januari 2011).

Riduwan, DRS. 2008. *Dasar-Dasar Statistika Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta Bandung

Santoso, Singgih. 2010. *Mastering SPSS 18*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

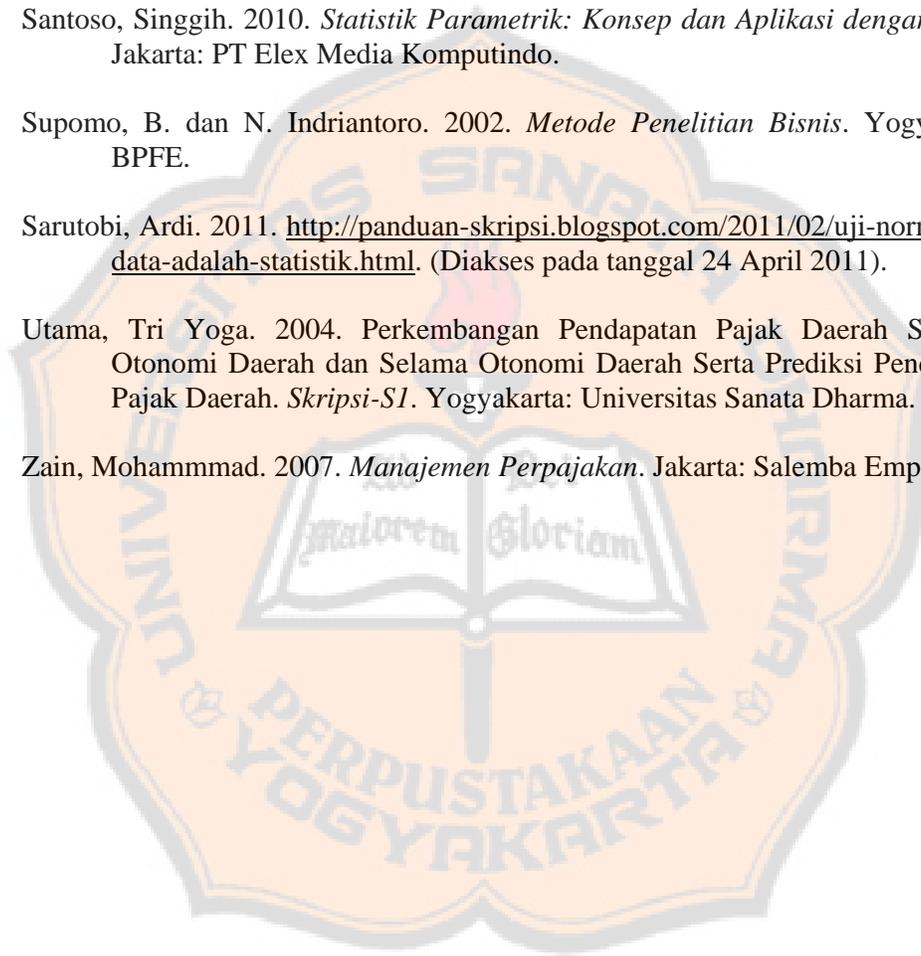
Santoso, Singgih. 2010. *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Supomo, B. dan N. Indriantoro. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

Sarutobi, Ardi. 2011. <http://panduan-skripsi.blogspot.com/2011/02/uji-normalitas-data-adalah-statistik.html>. (Diakses pada tanggal 24 April 2011).

Utama, Tri Yoga. 2004. *Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Daerah dan Selama Otonomi Daerah Serta Prediksi Pendapatan Pajak Daerah. Skripsi-S1*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Zain, Mohammmad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.







PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/6279/VI/2010.

Membaca Surat : KaProdi Akutansi .Fak. Ekonomi USD Yk. Nomor :31/Kaprodi .Akt/745/X/2010.

Tanggal Surat : 26 Oktober 2010 Perihal :Ijin Penelitian.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : DESSY SUNARWARSIKI NIP/NIM : 062114094
 Alamat : Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002.
 Judul : ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006 (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul).
 Lokasi : Kabupaten BANTUL
 Waktu : 3 (Tiga) bulan Mulai tanggal : 27 Oktober 2010 s/d 27 Januari 2011.

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 27 Oktober 2010.

An. Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Uu. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati BANTUL cq Ka Bappeda
3. Ka DPPKA Prov. DIY
4. KaProdi Akutansi .Fak. Ekonomi USD Yk.
5. Yang Bersangkutan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website <http://www.bappeda.bantulkab.go.id>
E-mail : bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/1733

Membaca Surat : Dari : Pemerintah Prop DIY Nomor : 070/6279/V/2010
Tanggal : 27 Oktober 2010 Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diizinkan kepada

Nama : **DESSY SUNARWARSIKI**
No.NIM : 062114094 Mhs : USD Yk
Judul : **ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul)**
Lokasi : **DPKAD Kab. Bantul & Bappeda Kab. Bantul**
Waktu : Mulai Tanggal : **27 Oktober 2010 s/d 27 Januari 2011**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : **Bantul**
Pada Tanggal : **28 Oktober 2010**

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbangpollinmas Kab. Bantul
3. Ka. DPKAD Kab Bantul
4. Ka. Bappeda Kab. Bantul
5. Yang bersangkutan

Ani Bupati Bantul
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris



Pedoman Wawancara

A. Pajak Daerah

1. Apa saja yang menyebabkan kenaikan dan penurunan masing-masing Pajak Daerah di Kabupaten Bantul?

a. Pajak Hotel

No.	Naik	Turun
1.	Tingkat hunian hotel meningkat.	Wajib Pajak Hotel yang dulu didata sekarang tidak.
2.	Banyaknya wisatawan.	Adanya hotel yang ditutup.
3.	Ada hotel baru.	Pada tahun 2006 terjadi gempa bumi
4.		Pada tahun 2008 adanya isu akan terjadi gempa bumi lagi.

b. Pajak Restoran

No.	Naik	Turun
1.	Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak Restoran dalam membayar pajak ke Pemerintah Daerah.	Jumlah pengunjung berkurang.
2.		Daya beli menurun.
3.		Pada tahun 2006 terjadi gempa bumi

4.		Pada tahun 2008 adanya isu akan terjadi gempa bumi lagi.
5.		Adanya Wajib Pajak Restoran yang belum terdata.

c. Pajak Hiburan

No.	Naik	Turun
1.	Pada tahun 2007 Jogja Expo Center (JEC) sudah mulai aktif untuk dipakai dalam pengadaan <i>event-event</i> .	Pengadaan upacara cembeng (masa giling tebu) di Madukismo.
2.	Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak ke Pemerintah Daerah.	Pengadaan upacara adat di Wonokromo Kasihan Bantul.
3.		Pada tahun 2006 terjadi gempa bumi.

d. Pajak Reklame

No.	Naik	Turun
1.	Setelah tahun 2005 penerimaan Reklame telah masuk ke dalam penerimaan Pajak Daerah bagian Pajak Reklame sehingga, menyebabkan penerimaan Pajak Reklame mengalami peningkatan.	Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 sebagian Pajak Reklame masih masuk sebagai konsesi Beban Ruang Publik (KBRP) dimana, penerimaan tersebut masuk dalam sumbangan pihak ketiga di Laporan Arus Kas di bagian lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
2.	Peningkatan order reklame atau meningkatnya jumlah pemasang reklame	Pada tahun 2006 terjadi gempa bumi
3.	Adanya kenaikan tarif Pajak Reklame pada tahun 2009 akibat diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang Baru.	

e. Pajak Penerangan Jalan

No.	Naik	Turun
1.	Adanya peningkatan pengguna listrik golongan rumah tangga khususnya untuk perabotan rumah tangga yang menggunakan listrik.	
2.	Adanya pelanggan listrik baru.	
3.	Peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga, berdampak pada naiknya pajak.	

f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

No.	Naik	Turun
1.	Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 adanya pembangunan ruko secara besar-besaran di daerah Jalan Parangtritis yang sebelumnya adalah daerah rawa, pembangunan Pasar Seni Gabusan dan pembangunan GOR	Pada tahun 2009 dimana keadaan yang sudah normal pasca gempa bumi.

2.	Jumlah penduduk yang bertambah.
3.	Jumlah eksploitasi bertambah.
4.	Kebutuhan penduduk akan Bahan Galian Golongan C bertambah.
5.	Pasca gempa bumi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 banyak penduduk yang membangun.

g. Pajak Parkir

No.	Naik	Turun
1.	Pada tahun 2007 penerimaan Pajak Parkir mulai ditargetkan.	Pada tahun 2006 terjadi gempa bumi.
2.	Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak Parkir dalam membayar Pajak Parkir.	
3.	Semakin luasnya potensi yang dapat dipakai sebagai lahan Parkir.	

2. Mengapa penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Bantul selalu menempati penerimaan terbesar posisi no. 6?

Jawab:

Karena kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Hotel yang selalu sama seperti: peningkatan jumlah pengunjung yang selalu sama dan tidak adanya perubahan jumlah hotel.

3. Mengapa penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Bantul pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 menempati penerimaan terbesar no. 3 dan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 penerimaan Pajak Restoran menempati penerimaan terbesar no. 4. Hal apa yang menyebabkannya? (peristiwa apa)

Jawab:

- a. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Pajak Restoran merupakan penerimaan Pajak Daerah terbesar nomor 3 di Kabupaten Bantul karena adanya kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Restoran yang selalu sama seperti: peningkatan jumlah pengunjung yang selalu sama.
- b. Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 Pajak Restoran merupakan penerimaan Pajak Daerah terbesar nomor 4 di Kabupaten Bantul dikarenakan pada tahun tersebut sebagian besar masyarakat Bantul banyak yang membangun kembali rumah mereka akibat gempa bumi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Mengapa penerimaan Pajak Hiburan selalu menempati penerimaan Pajak Daerah terbesar no. 5 di Kabupaten Bantul?

Jawab:

Karena potensi dari Pajak Hiburan yang selalu sama dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yaitu selalu berubah-ubahnya pengadaan *event-event* sepanjang tahun.

5. Mengapa penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan penerimaan Pajak Daerah terbesar no. 1 di Kabupaten Bantul. Hal apa yang menyebabkannya? (peristiwa apa)

Jawab:

Hal ini dikarenakan potensi dari Pajak Penerangan Jalan yang cukup besar seperti: adanya peningkatan pengguna listrik golongan rumah tangga khususnya untuk perabotan rumah tangga yang menggunakan listrik dan peningkatan taraf hidup masyarakat juga berdampak pada naiknya pajak.

6. Mengapa penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Bantul pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 menempati penerimaan Pajak Daerah terbesar no. 4 sedangkan, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dan tahun 2009 penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C menempati penerimaan Pajak Daerah terbesar no. 3. Pada tahun 2008 penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C menempati penerimaan Pajak Daerah terbesar no. 2. Hal apa yang menyebabkannya? (peristiwa apa)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan penerimaan Pajak Daerah terbesar no. 4 di Kabupaten Bantul dikarenakan adanya kondisi yang stabil dimana potensi dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selalu sama seperti: jumlah penduduk yang bertambah, eksploitasi bertambah, dan kebutuhan akan Bahan Galian Golongan C bertambah.
 - b. Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan penerimaan Pajak Daerah terbesar no. 3 di Kabupaten Bantul dikarenakan adanya rekonstruksi pasca gempa sedangkan, pada tahun 2009 dikarenakan kondisi yang normal pasca gempa.
 - c. Pada tahun 2008 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan penerimaan Pajak Daerah terbesar no. 2 di Kabupaten Bantul dikarenakan masih adanya rekonstruksi pasca gempa dimana sebagian besar masyarakat khususnya Bantul banyak yang membangun dan adanya bantuan dana untuk membangun pasca gempa.
7. Mengapa penerimaan Pajak Parkir merupakan penerimaan Pajak Daerah paling kecil di Kabupaten Bantul dibandingkan penerimaan Pajak Daerah lainnya. Hal apa yang menyebabkannya?

Jawab:

Karena potensi dari Pajak Parkir yang cukup kecil.

B. Lain-Lain

1. Usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan pendapatan di sektor Pajak Daerah?

Jawab:

- a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Mengadakan pembinaan kepada Wajib Pajak yang sudah ada (intensifikasi).
 - c. Penggalian potensi baru (ekstensifikasi).
2. Apa yang menyebabkan kontribusi pada tahun 2004 merupakan kontribusi terbesar sedangkan, pada tahun 2009 merupakan kontribusi terkecil di Kabupaten Bantul?

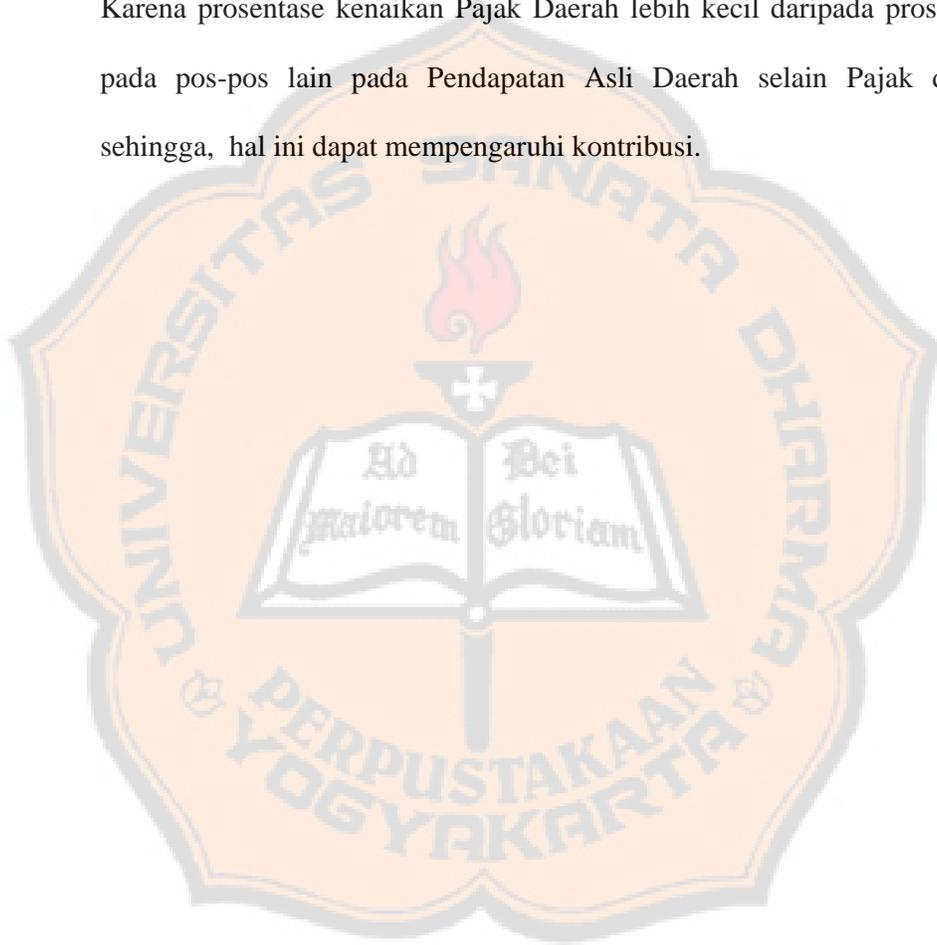
Jawab:

- a. Yang menyebabkan kontribusi pada tahun 2004 merupakan kontribusi terbesar di Kabupaten Bantul dikarenakan adanya penurunan penerimaan bunga deposito pada bagian lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp2.262.857.934,00.
- b. Yang menyebabkan kontribusi pada tahun 2009 merupakan kontribusi terkecil dikarenakan adanya kenaikan pada pos retribusi, pos bagian laba perusahaan milik daerah dan pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3. Apa yang menyebabkan sehingga ada perbedaan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006?

Jawab:

Karena prosentase kenaikan Pajak Daerah lebih kecil daripada prosentase pada pos-pos lain pada Pendapatan Asli Daerah selain Pajak daerah sehingga, hal ini dapat mempengaruhi kontribusi.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

132

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH T.A 2003 DAN TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A 2004 KABUPATEN BANTUL

NC	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET Tahun 2003	REALISASI Tahun 2003	%	TARGET Tahun 2004
1	2	3	4	5	6	7
I	111	PAJAK DAERAH				
1	1011000 1101	Pajak Hotel	35,000,000.00	35,333,000.00	100.95	36,000,000.00
2	1011000 1102	Pajak Restoran	166,000,000.00	166,501,755.00	100.30	167,500,000.00
3	1011000 1103	Pajak Hiburan	90,000,000.00	70,157,100.00	77.95	51,200,000.00
4	1011000 1104	Pajak Reklame	150,000,000.00	205,045,050.00	136.70	200,000,000.00
5	1011000 1105	Pajak Penerangan Jalan	5,900,000,000.00	6,024,204,768.00	102.11	6,100,000,000.00
6	1011000 1106	Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C	96,296,400.00	99,342,121.00	103.16	97,000,000.00
		JUMLAH I	6,437,296,400.00	6,600,583,794.00	102.54	6,651,700,000.00
II	112	RETRIBUSI DAERAH				
1	1011000 1201	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9,355,180,000.00	9,694,318,166.00	103.63	10,318,768,000.00
2	1011000 1202	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	118,017,000.00	120,805,850.00	102.36	121,300,800.00
3	1011000 1203	Retribusi Penggantian Bea Cetak KTP	731,605,000.00	697,160,500.00	95.29	378,805,000.00
4	1011000 1204	Retribusi Penggantian Bea Cetak Akte Catatan Sipil	193,275,000.00	233,807,500.00	120.97	193,275,000.00
5	1011000 1207	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15,342,000.00	15,342,000.00	100.00	15,342,000.00
6	1011000 1208	Retribusi Pelayanan Pasar	957,069,180.00	965,943,135.00	100.93	1,001,739,300.00
7	1011000 1209	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	236,934,250.00	260,829,750.00	110.06	236,934,250.00
8	1011000 1213	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	2,522,938,600.00	2,538,603,000.00	100.62	2,509,500,000.00
9	1011000 1216	Retribusi Jasa Usaha Terminal	52,035,150.00	51,425,550.00	98.83	52,035,150.00
10	1011000 1217	Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	34,215,100.00	34,309,400.00	100.26	4,035,000.00
11	1011000 1219	Retribusi Jasa Usaha Penyedotasi Kakus	7,000,000.00	7,552,000.00	107.89	7,680,000.00
12	1011000 1220	Retribusi Jasa Usaha Pemotongan Hewan	95,000,000.00	74,385,750.00	78.50	95,000,000.00
13	1011000 1222	Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	2,586,000,000.00	2,397,295,090.00	92.70	2,710,164,500.00
14	1011000 1225	Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	92,000,000.00	87,800,050.00	95.43	74,500,000.00
15	1011000 1226	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	500,000,000.00	685,470,098.00	137.09	500,000,000.00
16	1011000 1228	Retribusi Ijin Gangguan	150,000,000.00	202,613,524.00	135.08	100,000,000.00
17	1011000 1229	Retribusi Ijin Trayek	3,316,000.00	8,712,000.00	104.76	8,316,000.00
18	1011000 1230	Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	200,000,000.00	299,123,575.00	149.56	200,000,000.00
19	1011000 1231	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	50,290,000.00	84,375,000.00	167.78	51,955,000.00
20	1011000 1232	Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi	5,125,000.00	6,925,000.00	135.12	-
21	1011000 1233	Retribusi Angkutan Bus Perintis	25,000,000.00	20,048,700.00	80.19	33,480,000.00
22	1011000 1234	Retribusi Koperasi	2,260,000.00	2,520,000.00	111.50	2,300,000.00
		JUMLAH II	17,937,662,280.00	18,489,365,638.00	103.08	18,615,190,000.00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

133

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET Tahun 2003	REALISASI Tahun 2003	%	TARGET Tahun 2004
1	2	3	4	5	6	7
III	113	BAGIAN LABA USAHA DAERAH				
1	1011000 130101	PD. Bank Pasar	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00	2,000,000,000.00
2	1011000 130102	PD. Aneka Dhanna	225,000,000.00	225,000,000.00	100.00	230,000,000.00
3	1011000 130103	P D A M	-	-	-	-
4	1011000 130104	Bank Pembangunan Daerah	1,200,000,000.00	1,242,226,010.72	103.52	2,000,000,000.00
		JUMLAH III	3,425,000,000.00	3,467,226,010.72	101.23	4,230,000,000.00
IV	114	LAIN-LAIN PAD YANG SAH				
1	1011000 1401	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Terpisahkan	60,000,000.00	76,814,000.00	128.02	42,000,000.00
2	1011000 1402	Penerimaan Jasa Giro	220,000,000.00	258,657,198.00	117.57	250,000,000.00
3	1011000 1405	Penerimaan Bunga Deposito	2,287,000,000.00	2,922,250,823.92	127.78	3,000,000,000.00
4	1011000 1406	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4,908,100.00	6,015,300.00	122.56	-
5	1011000 1407	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	15,890,814.00	28,979,790.00	182.37	-
6	1011000 1408	Sumbangan Pihak III	50,000,000.00	46,850,000.00	93.70	50,000,000.00
7	1011000 1409	BUKP	17,732,907.76	17,732,907.76	100.00	1,756,613.53
8	1011000 1410	Uang Kecil	25,000.00	25,055.00	100.22	-
9	1011000 1413	Kelebihan Pembayaran Gaji / Tunjangan dan lain-lain	49,019,686.00	107,849,973.00	220.01	-
10	1011000 1414	SK Pemberian Hak Atas Tanah	8,000.00	8,000.00	100.00	-
11	1011000 1415	Penerimaan lain-lain	860,000,000.00	860,000,000.00	100.00	-
		Jumlah IV	3,564,584,507.76	4,325,183,047.68	121.34	3,343,756,613.53
		JUMLAH PAD	31,364,543,187.76	32,882,358,490.40	104.84	32,840,646,613.53
V	12	DANA PERIMBANGAN				
	1011000 2101	Bagi Hasil Pajak				
	1011000 210101	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9,269,383,218.22	11,081,465,167.00	119.55	9,046,739,528.00
	1011000 210102	- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTB	3,000,000,000.00	2,922,423,606.00	97.41	3,000,000,000.00
	1011000 210103	- Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21)	2,670,663,610.95	2,670,663,609.00	100.00	2,095,548,156.00
		JUMLAH V	14,940,046,829.17	16,674,553,382.00	111.61	14,142,287,684.00
VI	1011000 2102	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam				
	1011000 210201	- Iuran Hasil Pengusaha Hutan (IHPPH)	5,591,584.00	98,200,680.00	1,756.22	5,591,584.00
	1011000 210202	- Bagi Hasil Perikanan	659,435,030.00	339,124,255.00	51.43	659,435,030.00
	1011000 210203	- Bagi Hasil KUT	-	798,569.00	0.12	-
		JUMLAH VI	665,026,614.00	438,123,504.00	65.88	665,026,614.00
VII	122	DANA ALOKASI UMUM				
	1011000 2202	- Dana Alokasi Umum (DAU)	292,700,000,000.00	292,700,000,000.00	100.00	298,700,000,000.00
		JUMLAH VII	292,700,000,000.00	292,700,000,000.00	100.00	298,700,000,000.00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET Tahun 2003	REALISASI Tahun 2003	%	TARGET Tahun 2004
1	2	3	4	5	6	7
VIII	123 1011000 2301	DANA ALOKASI KHUSUS - Dana Alokasi Khusus	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
		JUMLAH VIII	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
	1011000 2401	Bagi Hasil Pajak Propinsi				
	1011000 240101	- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	9,871,228,045.80	9,871,228,045.00	100.00	9,721,537,233.00
	1011000 240105	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4,187,189,378.08	4,108,453,378.00	98.12	4,183,604,631.00
	1011000 240106	- Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah		78,736,000.00	-	-
		JUMLAH VIII	14,058,417,423.88	14,058,417,423.00	-	13,905,141,864.00
IX	1011000 2402	Bantuan Keuangan dari Propinsi Kab. / Kota				
	1011000 240201	- Penerimaan dari Propinsi	208,647,000.00	326,199,000.00	156.19	-
	1011000 240202	- Penerimaan dari Kabupaten / Kota	1,068,460,500.00	1,071,743,348.00	100.31	863,146,728.00
		JUMLAH IX	1,277,307,500.00	1,397,942,348.00	109.44	863,146,728.00
X	131	Lain-lain Pendapatan Yang Sah				
	1011000 310201	- Dana Penyeimbang	24,240,120,000.00	24,240,121,000.00	100.00	24,240,120,000.00
	1011000 310202	- Kompensasi Pengembalian PPh Ps 21 Gaji PNS	6,002,470,631.00	6,002,470,631.00	100.00	-
		JUMLAH X	30,242,590,631.00	30,242,591,631.00	100.00	24,240,120,000.00
		JUMLAH BUKAN PAD	354,883,388,998.05	356,511,628,288.00	100.46	352,515,722,890.00
		JUMLAH PENDAPATAN	386,247,932,185.81	389,393,985,778.40	100.81	385,356,369,503.63

Bantul, 05 Maret 2004

KEPALA DIPENDA
KABUPATEN BANTUL

Drs. SURYANTO
(Pembina Tk. I IV/b)
NIP : 490017900

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

135

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2004 REALISASI	TAHUN 2005	
				TARGET	REALISASI
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rupiah	30,777,820,174.23	35,006,940,813.49	37,830,787,663.38
I	PAJAK DAERAH	Rupiah	7,085,891,785.00	7,688,500,000.00	7,837,546,787.00
	1 Pajak Hotel	Rupiah	36,061,500.00	36,000,000.00	36,900,000.00
	2 Pajak Restoran	Rupiah	169,212,190.00	167,500,000.00	168,096,815.00
	3 Pajak Hiburan	Rupiah	84,435,780.00	80,000,000.00	80,002,675.00
	4 Pajak Reklame	Rupiah	328,629,350.00	300,000,000.00	312,343,100.00
	5 Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rupiah	6,343,764,690.00	7,000,000,000.00	7,105,268,790.00
	6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Rupiah	123,788,275.00	105,000,000.00	131,759,907.00
	7 Pajak Parkir	Rupiah	-	-	3,175,500.00
II	RETRIBUSI DAERAH	Rupiah	19,186,122,250.00	23,343,945,500.00	23,800,473,870.00
	1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	10,479,347,381.00	14,468,096,000.00	15,269,655,269.00
	2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	126,503,750.00	128,320,800.00	142,439,525.00
	3 Retribusi Penggantian Bea Cetak KTP	Rupiah	390,185,000.00	545,805,000.00	570,442,500.00
	4 Retribusi Penggantian Bea Cetak Akte Capil	Rupiah	216,189,000.00	208,275,000.00	232,934,000.00
	5 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Rupiah	15,344,000.00	15,342,000.00	15,408,500.00
	6 Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	1,012,844,800.00	1,001,868,900.00	1,012,901,020.00
	7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rupiah	288,091,750.00	298,509,500.00	364,442,750.00
	8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	2,359,435,900.00	2,112,250,000.00	1,454,939,600.00
	9 Retribusi Jasa Usaha Terminal	Rupiah	52,057,000.00	50,874,400.00	51,112,700.00
	10 Retribusi Tempat Parkir Khusus	Rupiah	4,035,000.00	3,667,500.00	3,812,000.00
	11 Retribusi Penyedotan Kakus	Rupiah	7,808,000.00	7,700,000.00	6,272,000.00
	12 Retribusi Rumah Potong Hewan	Rupiah	81,887,350.00	85,000,400.00	81,368,250.00
	13 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Rupiah	2,391,189,460.00	2,500,000,000.00	2,279,890,760.00
	14 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rupiah	67,101,650.00	74,500,000.00	77,012,200.00
	15 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	Rupiah	737,389,460.00	800,000,000.00	920,402,421.00
	16 Retribusi Ijin Gangguan	Rupiah	248,794,262.00	200,000,000.00	284,146,008.00
	17 Retribusi Ijin Trayek	Rupiah	8,932,000.00	12,441,000.00	12,525,000.00
	18 Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	Rupiah	539,295,587.00	700,000,000.00	841,836,767.00
	19 Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	Rupiah	81,175,000.00	61,125,000.00	86,160,000.00
	20 Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Rupiah	7,300,000.00	28,000,000.00	28,675,000.00
	21 Retribusi Koperasi	Rupiah	2,400,000.00	3,500,000.00	5,460,000.00
	22 Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Medis	Rupiah	16,520,000.00	13,790,000.00	27,650,000.00
	23 Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air	Rupiah	5,955,900.00	4,000,000.00	5,067,600.00
	24 Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Keperawatan	Rupiah	3,080,000.00	10,780,000.00	13,020,000.00
	25 Retribusi Sarana Kesehatan	Rupiah	-	10,100,000.00	12,900,000.00
	26 Retribusi Angkutan Bus Perintis	Rupiah	43,260,000.00	-	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2004 REALISASI	TAHUN 2005	
				TARGET	REALISASI
III	BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH	Rupiah	3,075,748,742.12	2,912,785,812.49	2,912,785,812.49
	1 PD. Aneka Dharma	Rupiah	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	2 PD. Bank Pasar	Rupiah	1,100,000,000.00	635,000,000.00	635,000,000.00
	3 P D A M	Rupiah	-	100,000,000.00	100,000,000.00
	4 Bank Pembangunan Daerah	Rupiah	1,875,748,742.12	2,077,785,812.49	2,077,785,812.49
IV	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Rupiah	1,430,057,397.11	1,061,709,501.00	3,279,981,193.89
	1 Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor	Rupiah	4,900,000.00	-	1,500,000.00
	2 Penjualan Drum Bekas	Rupiah	27,378,000.00	26,652,000.00	630,000.00
	3 Penerimaan Jasa Giro	Rupiah	105,376,634.00	100,000,000.00	195,135,117.00
	4 Penerimaan Bunga Deposito	Rupiah	659,392,889.03	600,000,000.00	857,988,095.52
	5 Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rupiah	-	-	4,224,404.00
	6 Penerimaan TP/TGR	Rupiah	282,816,471.79	-	1,596,544,072.79
	6 Sumbangan Pihak Ketiga	Rupiah	250,125,000.00	200,000,000.00	223,850,000.00
	7 B U K P	Rupiah	1,756,632.29	5,057,501.00	5,058,236.08
	9 Pemberian Hak atas Tanah	Rupiah	444,000.00	-	-
	8 Kelebihan Pembayaran Pihak III	Rupiah	53,823,147.00	-	61,213,441.00
	10 Pendapatan Angkutan Bus Perintis	Rupiah	-	30,000,000.00	30,098,500.00
	11 Pendapatan Pasar Seni Gabusan	Rupiah	-	100,000,000.00	107,291,902.50
	13 Penerimaan Lain-lain	Rupiah	44,044,623.00	-	196,447,425.00
	14 Pendapatan Bantul Ekspo	Rupiah	-	-	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DATA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL

URAIAN	SATUAN	TAHUN 2005 REALISASI	TAHUN 2006		TAHUN 2007		TAHUN 2008		TAHUN 2009		TAHUN 2010	
			TARGET PRBHN	REALISASI	TARGET MURNI	REALISASI s/d SEPT						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rupiah	37,830,787,663.38	31,779,625,336.79	44,044,788,019.67	46,240,110,245.60	57,229,726,493.62	59,069,544,315.41	69,800,761,508.85	77,286,936,022.99	88,691,362,690.38	90,238,879,883.48	60,240,233,691.28
PAJAK DAERAH	Rupiah	7,837,546,787.00	5,501,466,000.00	9,836,299,528.00	8,104,466,000.00	10,191,535,467.00	9,507,000,000.00	12,070,898,846.00	14,036,000,000.00	14,108,451,478.96	16,489,578,000.00	12,438,779,328.00
1 Pajak Hotel	Rupiah	36,900,000.00	20,000,000.00	22,200,500.00	30,000,000.00	40,990,000.00	35,000,000.00	37,455,000.00	45,000,000.00	48,340,000.00	60,000,000.00	63,595,000.00
2 Pajak Restoran	Rupiah	168,096,815.00	105,000,000.00	114,888,610.00	105,000,000.00	121,054,600.00	127,000,000.00	149,261,025.00	163,000,000.00	188,874,430.00	180,000,000.00	298,900,000.00
3 Pajak Hiburan	Rupiah	80,002,675.00	61,466,000.00	70,486,400.00	61,466,000.00	71,131,950.00	68,000,000.00	77,380,700.00	78,000,000.00	91,851,050.00	100,000,000.00	121,591,302.00
4 Pajak Rukhane	Rupiah	312,343,100.00	215,000,000.00	268,114,400.00	300,000,000.00	377,650,950.00	390,000,000.00	415,753,000.00	1,230,000,000.00	1,244,917,012.99	1,800,000,000.00	1,714,499,385.00
5 Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rupiah	7,105,268,790.00	5,000,000,000.00	9,195,362,105.00	7,500,000,000.00	9,371,924,175.00	8,722,000,000.00	10,834,709,060.00	12,205,000,000.00	12,138,890,000.00	13,984,578,000.00	9,978,405,358.00
6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Rupiah	131,759,907.00	100,000,000.00	162,634,513.00	105,000,000.00	204,850,792.00	150,000,000.00	543,959,061.00	300,000,000.00	378,934,486.00	360,000,000.00	240,969,783.00
7 Pajak Parkir	Rupiah	3,175,500.00	-	2,613,000.00	3,000,000.00	3,933,000.00	15,000,000.00	12,381,000.00	15,000,000.00	16,644,500.00	15,000,000.00	20,818,500.00
RETRIBUSI DAERAH	Rupiah	23,800,473,870.00	19,875,810,100.00	22,451,031,417.00	27,329,135,150.00	30,808,408,803.00	31,479,627,550.00	37,171,638,611.00	48,219,832,144.00	58,205,951,445.00	56,377,938,962.00	36,393,049,688.00
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rupiah	15,269,655,269.00	13,870,174,000.00	15,920,309,277.00	19,696,160,000.00	22,132,244,315.00	23,338,361,000.00	27,486,574,478.00	38,341,894,000.00	47,021,730,925.00	45,352,894,000.00	28,274,190,548.00
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rupiah	142,439,525.00	56,251,700.00	102,536,575.00	125,506,400.00	133,594,230.00	130,686,000.00	144,180,575.00	153,743,200.00	171,669,300.00	203,743,200.00	194,445,100.00
3 Retribusi Penggantian Bea Cetak KTP	Rupiah	570,442,500.00	115,682,500.00	129,734,500.00	497,485,000.00	738,075,500.00	497,485,000.00	598,751,000.00	6,717,000.00	8,123,500.00	6,717,000.00	-
4 Retribusi Penggantian Bea Cetak Akte Capi	Rupiah	232,934,000.00	86,669,000.00	87,039,000.00	182,380,000.00	217,780,000.00	182,380,000.00	273,328,000.00	5,504,000.00	13,979,000.00	9,475,000.00	5,855,000.00
5 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Rupiah	15,408,500.00	10,170,000.00	10,725,500.00	12,267,500.00	13,017,000.00	12,402,000.00	13,065,000.00	11,402,200.00	11,985,000.00	10,800,000.00	11,535,000.00
6 Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	1,012,901,020.00	390,364,850.00	413,052,375.00	1,000,000,000.00	1,013,633,425.00	1,042,431,300.00	1,058,623,225.00	1,142,357,300.00	1,210,959,350.00	1,276,115,400.00	1,020,003,675.00
7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rupiah	364,442,750.00	460,514,850.00	463,045,100.00	475,721,500.00	488,056,750.00	504,588,600.00	527,517,250.00	467,246,500.00	489,419,750.00	512,610,000.00	367,279,700.00
8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rupiah	1,454,939,500.00	1,906,700,000.00	1,930,015,000.00	1,929,250,000.00	1,963,416,500.00	1,928,550,000.00	1,946,856,500.00	1,979,004,500.00	2,019,081,100.00	1,925,601,000.00	200,980,400.00
9 Retribusi Jasa Usaha Terminal	Rupiah	51,112,700.00	33,012,050.00	40,448,500.00	37,460,750.00	40,917,550.00	38,558,650.00	42,150,300.00	40,971,950.00	41,192,200.00	38,558,550.00	29,151,800.00
10 Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rupiah	3,812,000.00	3,667,500.00	3,900,000.00	5,217,500.00	6,450,000.00	13,550,000.00	16,060,000.00	29,400,000.00	30,100,000.00	34,220,000.00	30,150,000.00
11 Retribusi Penyodotan Kakus	Rupiah	6,272,000.00	7,680,000.00	8,192,000.00	7,680,000.00	7,936,000.00	7,680,000.00	8,576,000.00	8,704,000.00	8,960,000.00	8,704,000.00	7,424,000.00
12 Retribusi Rumah Potong Hewan	Rupiah	81,368,250.00	35,000,000.00	28,684,425.00	56,621,500.00	56,636,725.00	68,575,000.00	68,597,675.00	70,000,000.00	70,046,600.00	72,002,500.00	57,765,775.00
13 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Rupiah	2,279,890,760.00	1,600,000,000.00	1,401,224,050.00	1,600,000,000.00	1,657,151,500.00	1,736,000,000.00	2,060,492,850.00	3,155,000,000.00	4,242,266,750.00	3,904,900,000.00	3,563,136,700.00
14 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rupiah	77,012,200.00	47,500,000.00	47,804,200.00	84,460,000.00	84,481,000.00	134,385,000.00	134,474,450.00	140,424,000.00	140,443,450.00	347,024,000.00	151,734,450.00
15 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	Rupiah	920,402,421.00	445,000,000.00	773,834,387.00	703,800,000.00	971,462,900.00	800,000,000.00	942,545,656.00	935,000,000.00	1,013,705,277.00	935,000,000.00	846,134,960.00
16 Retribusi Ijin Gangguan	Rupiah	284,146,008.00	125,000,000.00	266,233,863.00	200,000,000.00	468,989,418.00	210,000,000.00	591,764,944.00	591,764,944.00	585,939,688.00	591,764,944.00	452,465,965.00
17 Retribusi Ijin Trayek	Rupiah	12,525,000.00	5,340,000.00	6,660,000.00	5,100,000.00	5,640,000.00	8,880,000.00	10,160,000.00	5,540,000.00	5,660,000.00	5,540,000.00	3,200,000.00
18 Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	Rupiah	841,836,767.00	600,000,000.00	693,962,665.00	600,000,000.00	637,965,740.00	675,000,000.00	993,409,158.00	991,000,000.00	945,045,855.00	993,409,368.00	1,019,389,565.00
19 Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	Rupiah	86,160,000.00	46,000,000.00	71,735,000.00	59,185,000.00	101,510,000.00	88,415,000.00	147,835,000.00	89,385,000.00	96,562,500.00	84,160,000.00	80,150,000.00
20 Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Rupiah	28,675,000.00	4,000,000.00	12,475,000.00	3,000,000.00	10,025,000.00	15,100,000.00	31,125,000.00	7,000,000.00	-	-	10,550,000.00
21 Retribusi Koperasi	Rupiah	5,460,000.00	1,500,000.00	2,080,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	-	-	-	-	-	-
22 Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Medis	Rupiah	27,650,000.00	10,568,250.00	8,260,000.00	9,100,000.00	13,160,000.00	9,100,000.00	16,730,000.00	9,100,000.00	7,420,000.00	9,100,000.00	20,300,000.00
23 Retribusi Pemeniksaan Kwalitas Air	Rupiah	5,067,600.00	2,200,000.00	3,320,000.00	7,000,000.00	10,925,250.00	12,000,000.00	18,073,550.00	18,073,550.00	20,161,200.00	20,000,000.00	14,187,050.00
24 Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Keperawatan	Rupiah	13,020,000.00	7,011,900.00	14,560,000.00	14,000,000.00	13,300,000.00	14,000,000.00	6,300,000.00	5,600,000.00	4,900,000.00	5,600,000.00	6,580,000.00
25 Retribusi Sarana Kesehatan	Rupiah	12,900,000.00	5,803,500.00	11,200,000.00	16,300,000.00	20,600,000.00	11,500,000.00	34,450,000.00	15,000,000.00	31,600,000.00	23,000,000.00	25,840,000.00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

URAIAN	SATUAN	TAHUN 2005 REALISASI	TAHUN 2006		TAHUN 2007		TAHUN 2008		TAHUN 2009		TAHUN 2010	
			TARGET PERBHN	REALISASI	TARGET PRBHN	REALISASI	TARGET PRBHN	REALISASI	TARGET PRBHN	REALISASI	TARGET MURNI	REALISASI s/d SEPT
CIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH	Rupiah	2,912,785,812.49	2,873,759,676.79	2,579,134,676.79	2,881,430,036.83	3,014,646,125.98	3,620,774,435.57	3,449,914,968.58	7,489,837,441.99	7,512,838,194.82	8,573,000,000.00	7,424,932,057.58
1 PD. BANK BANTUL	Rupiah	635,000,000.00	394,625,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	1,044,468,348.97	1,044,468,348.97	1,402,000,000.00	1,782,347,216.75
2 PD. ANEKA DHARMA	Rupiah	100,000,000.00	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	73,000,000.00	-	-	23,000,000.00	80,000,000.00	-
3 P D A M	Rupiah	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	-
4 BUKP	Rupiah	-	-	-	31,430,036.63	31,478,076.87	24,483,363.65	26,623,886.66	59,117,093.02	59,117,093.02	91,000,000.00	91,161,853.24
5 Bank Pembangunan Daerah	Rupiah	2,077,785,812.49	2,479,134,676.79	2,479,134,676.79	2,700,000,000.00	2,833,168,049.11	3,423,291,081.92	3,423,291,081.92	6,386,252,000.00	6,386,252,752.83	7,000,000,000.00	5,551,422,987.59
IN-LAIN PAD YANG SAH	Rupiah	3,279,981,193.89	3,528,589,560.00	9,178,322,397.88	7,925,079,058.97	13,215,136,067.84	14,462,142,328.84	17,108,309,083.27	7,541,296,437.00	8,884,121,571.57	8,798,362,921.48	3,983,472,617.70
1 Penjualan Perlatan / Perlengkapan Kantor	Rupiah	1,500,000.00	-	-	-	-	-	52,700,000.00	223,325,000.00	232,925,000.00	80,214,000.00	45,360,000.00
2 Penjualan Drum Bekas	Rupiah	630,000.00	456,000.00	-	6,318,000.00	720,000.00	12,000,000.00	6,732,000.00	7,476,000.00	13,050,000.00	6,324,000.00	4,908,000.00
3 Penerimaan Jasa Giro	Rupiah	195,135,117.00	200,000,000.00	485,173,211.00	200,000,000.00	488,565,778.00	647,913,504.76	379,705,064.29	250,000,000.00	265,038,503.00	250,000,000.00	223,962,130.25
4 Penerimaan Bunga Deposito	Rupiah	857,988,095.52	3,065,000,000.00	7,444,744,187.88	7,000,000,000.00	9,988,812,018.29	13,319,227,611.08	14,457,481,521.68	5,250,000,000.00	5,596,583,531.57	4,617,672,738.48	1,947,013,868.22
5 Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rupiah	4,224,404.00	-	-	-	2,303,834.00	-	601,782.00	-	734,008.00	-	2,921,351.00
6 Pendapatan Denda Perjanjian Tertentu	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	393,765,000.00	604,645,000.00	156,565,000.00	215,125,000.00
7 Panerimaan TP/ITGR	Rupiah	1,596,544,072.79	-	656,172,444.00	-	328,499,482.00	-	1,622,988,778.50	74,644,534.00	106,128,895.00	28,685,601.00	485,312,256.85
8 Sumbangan Pihak Ketiga	Rupiah	223,850,000.00	200,000,000.00	202,955,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9 B U K P	Rupiah	5,058,236.08	21,498,798.00	21,498,831.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Pembenan Hak atas Tanah	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Kelebihan Pembayaran Pihak III	Rupiah	61,213,441.00	-	66,944,065.00	-	75,847,588.00	-	99,216,029.00	63,680,903.00	147,113,395.00	55,364,843.00	74,875,238.00
12 Penerimaan Lain-lain	Rupiah	333,837,827.50	51,634,762.00	300,834,659.00	718,761,058.97	2,330,387,397.35	483,001,214.00	488,883,907.80	1,278,375,000.00	1,897,902,239.00	3,603,536,739.00	983,994,773.38

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran. Hasil Perhitungan SPSS *Independent Samples Test* Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006

Group Statistics					
	waktu_terjadi	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Penerimaan_Pajak_Daerah	sebelum gempa	3	7,174,674,122.0000	623,242,399.90173	359,829,167.35365
	sesudah gempa	3	12,123,628,597.3300	1,958,990,321.88840	1,131,023,589.68214

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Penerimaan_Pajak_Daerah	Equal variances assumed	1.783	.253	-4.170	4	.014	-4.94895E9	1.18688E9	-8.24427E9	-1.65364E9
	Equal variances not assumed			-4.170	2.401	.038	-4.94895E9	1.18688E9	-9.31980E9	-5.78108E8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Perhitungan SPSS *Independent Samples Test* Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006

Group Statistics

waktu_terjadi		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kontribusi_Pajak_Daerah	Sebelum gempa	3	21.2700	1.55000	.89489
	Sesudah gempa	3	17.0033	.98190	.56690

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Kontribusi_Pajak_Daerah	Equal variances assumed	1.089	.356	4.028	4	.016	4.26667	1.05934	1.32545	7.20788
	Equal variances not assumed			4.028	3.383	.022	4.26667	1.05934	1.10113	7.43221